

**ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA:
Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)**



SKRIPSI

Diajukan

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)
dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam
Konsentrasi Ilmu Politik**

Oleh:

BUJANG EFENDI

NIM. 11421801

**KONSENTRASI ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2017**

NOMOR B-1990/Un.09/IV.1/PP.01/11/2017

SKRIPSI

ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA:
Kajian Atas Konsep Dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

BUJANG EFENDI
NIM. 11421801

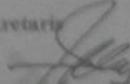
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 02 November 2017

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

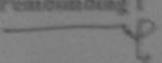
Ketua Dewan Penguji


Dr. Moh. Syayekhuddin, M.Ag.
NIP. 19711124 200312 1 001

Sekretaris


Sholeh Khudin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19741025 200312 1 003

Pembimbing I


Dr. Nur Huda Ali, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

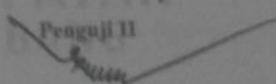
Penguji I


Dr. Moh. Syayekhuddin, M.Ag.
NIP. 19711124 200312 1 001

Pembimbing II


Ryllian Chandra, M.A.

Penguji II

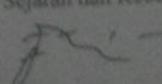

Kiki Mikail, M.Sc

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Tanggal, 29 November 2017



Ketua Program Studi
Sejarah dan Kebudayaan Islam


Padila, S.S., M.Hum.
NIP. 19760723 200710 1 003

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara,
Bujang Efendi

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**"ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA:
Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)"**

Yang ditulis oleh:

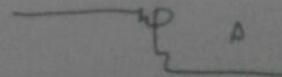
Nama : Bujang Efendi
NIM : 11421801
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Konsentrasi : Ilmu Politik

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Agustus 2017

Pembimbing I,



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara,
Bujang Efendi

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**"ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA:
Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Bujang Efendi
NIM : 11421801
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Konsentrasi : Ilmu Politik

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Agustus 2017

Pembimbing II,



Ryllian Chandra, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelarkesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacukan dalam naskah ini, dan juga disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab sesuai aturan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Palembang, 31 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Bujang Efendi

MOTTO PERJUANGAN

“Aku tidak pernah mengetahui adanya rumus kesuksesan, tetapi aku menyadari bahwa kalau rumus kegagalan itu adalah sikap asal semua orang”.

“Dont think what you get, but think what you give”.

“yakin usaha sampai”.

KATA PENGANTAR

Rasa penuh syukur dan ikhlas ku panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurahan kepada sang revolusioner Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan suri tauladan dalam berakhlak. Berkat ridho, petunjuk, dan pertolongan Allah SWT skripsi yang berjudul **“Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)”** ini dapat terselesaikan. Dalam penyelesaiannya, penulis mengucapkan rasa syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam hal ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Atas keterlibatan kedua orang yang menjadi sang motivator, inspirator sebagai sumber dari perjalanan studiku dalam melangkah. Ya, mereka adalah kedua orang tuaku ayahanda M. Yamin (Alm) dan Ibunda tercinta Asuha. Yang telah rela ikhlas siang dan malam mengeluarkan keringat untuk berjuang demi kesuksesan anak-anaknya dalam studi serta do'a-do'a mulianya yang selalu dikumandangkan kepada-Mu *ya rabb*. Karena ku yakin semua itu atas izin dan kehendak dan ridho-Mu adalah tak lepas dari ridhonya orang tuaku serta kepada kakak kandungku yakni Biar M Yamin yang kini sebagai motor (penggerak/pemegang kendali) daripada tulang punggung keluarga dan juga tak henti-hentinya memberikan

percikan kritis yang membangun selalu disampaikan mengingatkan bahwa aku belumlah tenggelam dalam ilmu pengetahuan, mendidikanku untuk jangan pernah berleha-leha berjuang dalam studi serta celotehan kritis yang terus membangun selalu dikumandangkan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan dalam halpun itu. Serta keterlibatan kakak ayuk kandungku sekeluarga dirumah yang telah mendukung penuh ku sampaikan terimakasih atas segalanya.

2. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Dr. Noer Huda, M.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora dalam hal ini sekaligus Pembimbing I, yang telah rela memberikan celotehan kritis yang membangun dalam membuat karya ilmiah, maupun ucapan terima kasih atas bukunya sebagai bahan dasar literature yang menunjang untuk memperkayai referensi pendukung skripsi ini kepada penulis.
4. Pembimbing II yakni Ryllian Chandra, MA yang telah sudi memberi arahan, masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. Moh. Syawaluddin, M.Ag dan Kiki Mikail, M.Sc yang bertindak sebagai dewan penguji I dan II atas kritikan yang membangun membuat skripsi ini dapat dipertahankan bukan berarti final. Penulispun menyadari masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan.

6. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam yakni Bapak Padillah, S.S., M.Hum yang senantiasa membimbing, membina serta memberikan masukan motivasi agar saya tetap ingat dan sadar akan peran serta fungsi sebagai seorang mahasiswa. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang pernah terlibat dalam mendidik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Bapak Mukhlisin Malik, S.Ag, M.Pd.I sedikit banyaknya telah rela memberikan masukan, bantuan informasi literature yang berkaitan tentang penelitian penulis ini yang menunjang kelancaran untuk menyelesaikan studi penelitian serta terima kasih atas kepercayaan, kemudahan informasi atas peminjaman bukunya kepada penulis.
8. Kepada Almamaterku tercinta kampus biruku merupakan pusat keilmuan peradaban Islam yang konsisten dengan visinya yaitu berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami. Tentunya tempat sejarah perjuanganku dalam menempuh studi. Adalah kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kurang lebih 6 tahun menempuh studi dengan berbagai penuh lika-liku yang sulit ku tebak, suka duka yang ku jalani. Alhamdulillah, semuanya akan terbayar ketika memakai toga baju kebanggaan yang sudah lama orang tua dan keluarga rindukan selama ini.
9. Serta semua rekan-rekan yang mungkin kita sama-sama hadir dalam satu kelas, satu angkatan, satu visi dan misi, satu perjuangan dalam garis

organisasi (HMI), maupun kepada semua pihak mungkin kita beda dalam pandangan pola pikir bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Namun haqqul yaqin-lah semua itu penuh dengan hikmahnya. Maka dengan berbeda pandangan maka kita akan terus dan terus selalu untuk berfikir progresif yang bergerak terus dan selalu dinamis. Dan itu telah diajarkan oleh Islam, perbedaan adalah *rahmatan lil 'alamiin*.

Akhirnya penulis menyakini bahwa dalam penulisan skripsi ini penuh dengan keterbatasan, kekurangan disana sini. Seperti pribahasa tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi menjadi sebuah hasil karya yang menjadikan sebagai jembatan wawasan khazanah keilmuan.

Palembang, 3 November 2017
Penulis,

BUJANG EFENDI
NIM : 11421801

ABSTRAK

*Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Konsentrasi Ilmu Politik Program Strata 1
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi 2017*

Bujang Efendi, **Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)**

Etika politik merupakan suatu tema yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak hanya menjadi sebuah acuan, maupun konsep ideal semata. Seyogyanya, etika politik bisa menjadi sumbangan terbesar dalam pembangunan politik dan etika politik dibangun tentunya yang diwarnai nilai-nilai Islam. Sehingga menjadi sebuah panduan untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Etika politik Islam Indonesia kajian atas konsep dan aksi Mohammad Natsir 1908-1993 yang dibahas ini bukan suatu kebetulan semata. Namun, membaca fenomena saat ini, penyalagunaan wewenang kerap kali terjadi. Sehingga menumbuhkan sikap korup, suap, dan lainnya. Menelusuri rekam jejak sang tokoh nasionalis muslim ini seperti Mohammad Natsir pada etika politik Islamnya merupakan suatu tawaran, dasar, dan ruhnya untuk menjawab problematika umat dan bangsa. Oleh karena itu, mengemukakan dengan cara hujjah yang tersendiri, langsung atau tidak langsung, akan ketinggian dasar dan ajaran-ajaran Islam. Islam merupakan suatu kebudayaan (aturan) yang lengkap dalam hidup untuk segala pencinta-kemanusiaan dan pencinta- Tuhan. Bagi Natsir, Islam wajib jadi kreterium bagi hidup seorang muslim.

Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan pada judul tersebut, seperti halnya: bagaimana latar belakang pemikiran politik M. Natsir? Bagaimana konsep dan aksi etika politik Islam Indonesia bagi M. Natsir? Serta bagaimana relevansinya terhadap kondisi saat ini?. Oleh karenanya, maka penulis perlu menelusurinya dengan menggunakan metode sejarah (historis) dengan cara mengumpulkan, mengkritik, menafsirkan, dan mensintesis data. Pendekatan ilmu politik. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori behaviorial atau sering dikenal dengan teori biografik.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Mohammad Natsir yang terlahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat ini memiliki sosok yang sederhana, intelektual dan konstitusional. Pemikiran maupun tindakan Mohammad Natsir tentang bagaimana tatanan kehidupan dalam bernegara harus mengandung Al-qur'an dan Sunnah. Meskipun pemikirannya yang mengandung kontroversi, tetapi pemikiran tersebut sebagai upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara dan menjadikannya sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun

bathiniah. Hal yang paling kontroversi yakni dalam pemikirannya membolehkan mengadopsi sistem pemerintahan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, agar etika dalam berpolitik tetap terjaga dan terpelihara.

Kata Kunci: Etika Politik, Islam dan Mohammad Natsir

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Nota Dinas Pembimbing I.....	ii
Nota Dinas Pembimbing II.....	iii
Halaman Persetujuan Pengesahan.....	v
Halaman Pernyataan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kajian Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ETIKA POLITIK.....	22
A. Pengertian Etika.....	22
B. Pengertian Politik.....	27
C. Pengeritan Etika Politik.....	28
D. Etika Politik dalam Islam.....	31
BAB III BIOGRAFI POLITIK MOHAMMAD NATSIR.....	38
A. Latar Belakang Riwayat Hidup Mohammad Natsir.....	38
B. Karir Politik Mohammad Natsir.....	44
C. Karya- Karya Mohammad Natsir.....	54
BAB IV KAJIAN KRITIS ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA ATAS KONSEP DAN AKSI POLITIK M. NATSIR (1908-1993).....	58
A. Mohammad Natsir Seorang Birokrat.....	58
a. M. Natsir sebagai Menteri Penerangan: Sosok yang idealis.....	58
b. Mosi Integral Natsir: Sebuah Konsep Pemersatu Bangsa.....	64
c. M. Natsir seorang Perdana Menteri: Sebuah Kepercayaan.....	70
B. Mohammad Natsir Seorang Politisi.....	73
a. M. Natsir dan Masyumi: Seorang “Pembangkang”.....	74
b. M. Natsir di Majelis Konstituante: Sebagai Dakwah Perjuangan.....	79
c. M. Natsir dan PRRI: Sebuah Gerakan “Separatisme”.....	86
C. Relevansi Etika Politik M Natsir pada Masa Kini.....	91

BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia, tempat dimana beberapa tokoh besar Indonesia dilahirkan. Penduduk yang mayoritas beragama Islam dan sangat kental dengan nuansa Islami menjadikan banyak para pemikir umat dan bangsa yang muncul dari daerah ini. Adapun nama-nama tokoh seperti: Tuanku Imam Bonjol, Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Buya Hamka, Mohammad Natsir dan lain-lain.

Kiprah Natsir dikenal sebagai sosok seorang intelektual, pejuang, politikus, ulama, birokrat, dan negarawan. Perjuangan beliau melewati di antara rezim mulai dari masa penjajahan, pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru. Sebagai politisi muslim nasionalis di Indonesia, ketokohnya tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Inilah bukti kecintaan Natsir kepada bangsa Indonesia. Dengan ketokohan Natsir ke luar negeri, ia tetap mengharumkan bangsa Indonesia. Di panggung dunia, pada tahun 1957, ia pernah memimpin sidang Mukhtamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Namanya pun kian naik di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Di tahun 1967, ia wakil Presiden Mukhtamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Tahun 1969 Natsir menjadi anggota *World Muslim League*, Mekkah, Arab

Saudi.¹

Sementara itu, Natsir juga pernah aktif di *Majelis A'la Al-Alam lil Masjid* (Dewan Masjid Sedunia) yang berpusat di Mekkah sebagai anggota. Tiga tahun setelahnya, sebagai bukti nyata, Natsir pun mendapatkan gelar King Faisal Award atas pengabdianya dalam memperjuangkan Islam oleh Raja Arab Saudi pada tahun 1980. Di dunia internasional, Natsir juga dikenal karena dukungannya yang tegas terhadap pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa muslim di Asia dan Afrika serta usahanya untuk menghimpun kerjasama antara negara-negara muslim yang baru merdeka. Inamullah Khan menyebut Natsir salah satu tokoh besar dunia Islam abad ini. Sebagai sesepuh pemimpin politik, ia sering diminta untuk memberi pandangan-pandangannya oleh tokoh-tokoh PLO, Mujahidin Afghanistan, Moro, Bosnia serta tokoh-tokoh politik dunia non muslim, seperti Jepang dan Thailand.² Pada 1985, Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri *The International Islamic Charitable Foundation*, Kuwait. Setahun kemudian Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri *The Oxford Centre for Islamic Studies*, London, Inggris, dan anggota *Majelis Umana' International Islamic University*, Islamabad, Pakistan.³

Perjuangan panjang Natsir tidak banyak berjalan mulus tanpa halangan, tetapi seringkali ia harus dihadapkan pada berbagai permasalahan sulit. Sumbangsihnya terhadap negara Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari jasa-jasanya terhadap

¹M. Natsir, *Politik Santun di Antara Dua Rezim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), hal. 137. Selanjutnya disebut *Politik Santun*.

²Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Mohammad Natsir*, hal. 33-34

³M. Natsir, *Politik Santun*, hal. 119

bangsa hingga dimusuhi oleh pemerintah karena pemikirannya yang dianggap “membelot”. Berbicara tentang mengenai sejarah pergerakan Islam zaman modern tokoh pemikiran Islam yang juga memiliki organisasi besar tersebut, tentu begitu banyak memberikan dampak positif yang besar terhadap perkembangan Islam dunia adalah salah satunya Natsir bersama Partai Masyumi dengan satu tujuan yakni untuk membentuk masyarakat Islam dengan berpedoman kepada wahyu Allah.⁴

Dalam pemikiran Natsir, menurutnya, Islam bukanlah semata-mata suatu agama, melainkan suatu pandangan hidup yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Islam adalah sumber perjuangan dan sumber penentang dari setiap macam penjajahan dan Islam tidak memisahkan antara Agama dan Negara.⁵ Natsir merupakan sebagai tokoh guru umat dalam mengingatkan atau menyampaikan dakwah termasuk juga dalam bidang politik. Natsir terjun ke dunia politik bukanlah hanya semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi ia berpolitik hanya untuk membawa ajaran dakwah islamiyah agar etika dalam berpolitik tetap terpelihara. Ia sosok yang sangat teguh, konsisten pada prinsip pendiriannya dalam menjalankan dakwah politiknya walaupun berbagai macam tantangan dan hambatan yang menghadang, guncangan serta kemerosotan perpolitikan tetap tak mau surut dari posisinya sebagai penyampai dakwah. Dalam pemikiran Natsir seperti pada pengakuannya baik bidang keagamaan, politik, dan lain-lainnya banyak terpengaruh pada pemikiran Ahmad Hassan, Agus Salim, Ahmad Syurkati, Mohammad Abduh,

⁴M. Natsir, *Pak Natsir 80 Tahun: Penghargaan dan Penghormatan Generasi Muda*, Buku Kedua, (Jakarta: Media Dakwah, 1988), hal. 138-139. Selanjutnya disebut *Pak Natsir 80 Tahun*.

⁵M. Natsir, *Capita Selecta*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. xvii

Rasyid Ridha, Mohammad Ali, dan Syakib Arselan.⁶

Tokoh yang berasal dari Sumatera Barat ini merupakan dikenal dengan seorang pemimpin ummat dan bangsa. Ia adalah pendiri partai Masyumi sekaligus sebagai ketua umum partai terbesar pada zamannya serta dikenal juga sebagai sosok pemikir, pendakwah, politisi, birokrat, dan intelektual sebagai bukti nyata begitu banyak hasil karya-karya tulisan beliau pernah ia keluarkan baik itu dimuat dalam bentuk buku-buku, surat kabar, majalah sampai pada percikan ceramahnya. Natsir adalah pemimpin senior kalangan Islam yang disegani karena peranan politik dan keagamaan yang dilakukannya di dalam negeri, bahkan reputasinya diakui serta dihormati di dunia Internasional, khususnya negara-negara yang memiliki penganut Islam. Karena pengaruhnya yang kuat itu, ia sangat dibatasi aktivitasnya oleh pemerintahan Orde Baru.⁷ Dari perjalanan hidupnya, Natsir seorang berperilaku dan bersikap dalam setiap aktivitas politiknya menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam politik. Natsir adalah seorang idealis yang ingin menjalankan politik sesuai dengan semangat ajaran agama yang dianutnya, meskipun untuk itu harus menelan kekecewaan akibat prinsip dan pendiriannya yang lurus dan konsisten.⁸

Kaitannya dengan penelitian ini yang menjadi pusat perhatian penulis, salah satunya, adalah pada perbedaan pendapat Natsir di lembaga konstituante, seperti pada peristiwa polemik perdebatan atas dasar negara, mosi integral, hingga keterlibatannya

⁶Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi, Mohammad Natsir.*, hal. 7

⁷Firdaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik*, (Jakarta: Dyatama Milenia, 2004), hal. 211-212

⁸Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia kontemporer*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hal. 230

di PRRI. Sikap kepribadian yang ramah dan tutur kata yang halus menjadikan beliau berteman kepada siapa saja baik kawan maupun lawan. Walaupun berbeda dalam pandangan ia tetap santun, elegan, saling menghargai, tak pernah keluar kata-kata kasar, tetap mengedepankan etika dalam setiap perkataan dan perbuatannya.⁹

Relevansinya terhadap perbedaan politik Islam Natsir dengan politik Islam saat ini sungguh sangat jauh. Dalam perbedaan pendapat misalnya perdebatan M Natsir dengan Soekarno tentang dasar negara, mereka lebih mengutamakan bagaimana untuk bisa tetap mempertahankan argumentasinya masing-masing agar bisa diterima pendapatnya oleh kawan maupun lawan. Namun, jika dibandingkan dengan politik Islam sekarang bukan lagi pada cara pandangan terhadap sesuatu hal agar bisa hasil buah pokok pikirannya diikuti oleh kawan maupun lawan melainkan apa yang bisa dijadikan atau diberikan atas sesuatu hal dalam bentuk apapun sebagai imbalan ucapan terima kasih.

Disamping itu, Natsir juga terkenal karena kecenderungan ke arah perdebatan dan polemik. Namun, ia mampu membedakan antara perbedaan pendapat dan hubungan pribadi. Sejak masa mudanya, misalnya, Natsir telah terlibat dalam polemik sengit dengan Soekarno. Namun, ini tidak menghalangi hubungan pribadi dengan dia dalam beberapa kasus. Bahkan itu, ia mampu membuat kompromi dan kerjasama dengan Presiden Indonesia pertama. Meskipun ia tidak ingin membuat kompromi dengan komunisme, Natsir masih berteman dengan PKI pendukung (Partai Komunis Indonesia), seperti Sakirman dan D.N. Aidit. Hal semacam inilah hubungan

⁹M. Natsir, *Politik Santun*, hal. 137

pribadi juga jelas dalam persahabatan dengan para pemimpin Protestan dan Katolik, seperti A.M. Tambunan dan I.J. Kasimo.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut judul tentang “**Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)**”. Inilah yang menjadikan daya tarik magnet sendiri bagi penulis untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai arti sosok seorang Mohammad Natsir serta menekuni sikap teladannya. Ia tetap konsisten dengan berpedoman pada ajaran agama yang dianut dalam setiap tindakan dan pemikirannya. Semoga penulis mampu memposisikan diri sebagai regenerasi pemikir Natsir muda.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi timbulnya pemikiran Mohammad Natsir.?
2. Bagaimana etika politik Islam Indonesia terhadap konsep dan aksi politik Mohammad Natsir.?
3. Seperti apa relevansi pemikiran Mohammad Natsir terhadap kondisi saat ini.?

Dalam suatu penelitian supaya tidak jauh melebar terhadap pembahasan ini, maka perlu adanya suatu batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada pembahasannya yakni hanya meliputi: latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, karir politik, latar belakang pemikiran dan etika politik Mohammad Natsir saat di Menteri Penerangan, Mosi Integral, Perdana Menteri, sebagai politisi

¹⁰Sebuah Tulisan Yusril tentang *Combining Activism and Intellectualism The Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)*, Lihat, Sabar Sitanggang dkk, Ed, *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hal. 312-313

Partai Masyumi, anggota Majelis Konstituante hingga keterlibatannya saat PRRI serta relevansinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemikiran, etika politik dan relevasinya dengan kondisi politik Islam saat ini. Serta sekaligus memperkenalkan sosok seorang Mohammad Natsir. Meskipun tak banyak yang mengetahui sosok beliau namun pemikirannya hingga saat ini masih dibutuhkan dan relevan pada keadaan negara sekarang ini serta mendeskripsikan etika politik Mohammad Natsir dalam setiap konsep dan aksi politiknya.

Secara umum temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khazanah keilmuan tentang konsep etika politik Islam Indonesia. Pada khususnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang dan secara teori penelitian ini diharapkan sebagai wawasan penambah khazanah keilmuan yang lebih mendalam tentang konsep dan aksi politik Mohammad Natsir.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan demi kemajuan masyarakat khususnya

mengenai Mohammad Natsir, dan sebagai sumber informasi yang tentunya dapat memperkaya referensi tentang sejarah politik nasional khususnya tentang Mohammad Natsir.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana telah diketahui begitu banyak yang mengemukakan tentang Mohammad Natsir. Namun, pada telaah ini penulis mencoba untuk memusatkan perhatian pada penyelidikan etika politik Islam Indonesia terhadap konsep dan aksi politik Mohammad Natsir. Sepanjang penulis ketahui belum ada studi kasus tentang Mohammad Natsir dibidang etika politik.

Ada beberapa studi penelitian ilmiah yang mengangkat tentang pemikiran Mohammad Natsir baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi serta buku sekalipun. Adapun penelitian tentang Mohammad Natsir yang telah diteliti dan tentunya dalam hal ini sebagai bahan tinjauan pustaka peneliti untuk melakukan *review*, menggambarkan peta literatur yang berhubungan dalam pembahasan.¹¹ Di antara tulisan-tulisan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, Disertasi Ris'an Rusli yang kini dijadikan sebuah buku dengan judul: "Pemikiran Teologi Mohammad Natsir (Analisis Perbandingan dengan Pemikiran Teologi Islam Klasik)" pada tahun 2012¹². Buku tersebut menjelaskan pemikiran Natsir tentang kalam dan perbandingan aliran teologi Islam klasik, seperti

¹¹Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. xii

¹²Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Teologi Islam Klasik*, (Jogjakarta: Idea Press, 2012)

Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan Maturidiah. Kaitannya yang bisa didapatkan dari buku tersebut dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang latar belakang dan kedudukan Mohammad Natsir dalam sejarah modern Indonesia serta dasar prinsip teguh pemikirannya yang tetap idealis dan rasional. Sementara itu, yang membedakan buku tersebut dengan penelitian ini yakni terfokus pada etika politik Islam Indonesia atas konsep dan aksi politik Mohammad Natsir saat menjabat sebagai seorang birokrat dan politisi muslim.

Kedua, Buku Suyitno, yang berjudul “Konsep Negara menurut Mohammad Natsir suatu tinjauan dalam pemikiran politik Islam”, tahun 2015.¹³ Buku ini membahas tentang konsep negara menurut pemikiran Mohammad Natsir dan pemikiran politik Islam era klasik, pertengahan, dan kontemporer. Kaitannya yang bisa didapatkan dari buku tersebut dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang perjuangan dan karir Natsir serta konsepsinya tentang suatu ideologi negara serta pandangannya pada corak pemerintahan suatu negara dan tidak membahas pada etika politik Mohammad Natsir didalamnya. Sementara itu, dalam pada penelitian ini lebih terfokus terhadap etika politik Mohammad Natsir dalam setiap konsep dan aksi politiknya saat ia sebagai seorang birokrat dan politisi muslim.

Ketiga, Buku Ahmad Suhelmi, yang berjudul “Polemik Negara Islam: Soekarno vs M Natsir dalam memahami hubungan Agama dan Negara.”¹⁴ Pada buku ini terfokus pada perdebatan antara Natsir versus Soekarno mencari tentang dasar

¹³Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir Suatu Tinjauan dalam Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta, Idea Press, 2015)

¹⁴Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus M. Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002)

ideologi suatu negara. Kaitannya yang bisa didapatkan dari buku tersebut dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang sosialisasi politik Natsir serta pertarungan ideologis antara nasionalis muslim dan nasionalis sekuler. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti lebih terfokus terhadap etika politik Islam Indonesia atas konsep dan aksi politik Mohammad Natsir.

Dalam berbagai literatur tinjauan pustaka tersebut, yang menjadi pembeda pada skripsi penulis ini adalah memfokuskan M Natsir tentang politik dan khususnya etika politik dalam setiap konsep dan aksi politiknya. Untuk itu penulis mencoba untuk menggali nilai-nilai yang terkandung tentang Etika Politik Mohammad Natsir.

E. Kerangka Teori

Etika politik merupakan suatu tema yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia tidak hanya menjadi sebuah acuan, konsep ideal semata. Seyogyanya, etika politik bisa menjadi panduan serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, etika politik yang dicontohkan oleh banyak pejabat publik sungguh sangat jauh dari apa yang ideal. Etika secara umum yang kita mengerti sebagai apakah suatu perkataan ataupun perbuatan tersebut baik atau buruknya. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum dan kesatuan sosial tertentu.

Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaaa. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah: 1) ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai yang mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁵

Menurut K Bertens, disimpulkan etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai: 1) sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ata suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, 2) kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, 3) filsafat moral, yakni ilmu tentang baik dan buruk. Dalam poin ini, akan ditentukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.¹⁶

Jadi pada dasarnya yang menjadi tolok ukur pada etika adalah pikiran atau akal. Pada umumnya etika dapat diartikan bahwa sebagai usaha yang secara sistematis dengan menggunakan *rasio* untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial agar dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan pedoman dalam ketentuan-

¹⁵Siti Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Philosophy, Ethics, and Local Wisdom in the Moral Construction Of the Nation*, (Geneva: Globethics.net, 2013), hal, 18

¹⁶K. Bertens. *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal, 6

ketentuan, aturan-aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi.¹⁷

Sedangkan politik itu sendiri sangatlah luas. Banyak macam interpretasi para ahli politik memberikan pengertian tentang politik. Adapun pengertian politik oleh beberapa tokoh dibawah ini diantaranya: Menurut Kaspar Bluntschli mengatakan bahwa *“politics is the science which is concerned with the state, which endeavors to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development”* artinya politik adalah ilmu yang berkaitan dengan negara, yang berupaya untuk mengerti dan memahami kondisi negara, di alam esensial, berbagai bentuk manifestasi, perkembangannya. Sementara itu, menurut Harold D. Lasswell mengatakan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan *“when we speak of the science of politics, we mean the science of power”*. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar pada politik adalah sebuah proses pengambilan sebuah keputusan, sebuah perebutan untuk memperoleh akses pada posisi pengambilan keputusan, dan proses kewenangan untuk menjalankan keputusan-keputusan itu. P Eric Laouw (2005) mengatakan politik mengandung makna sejumlah konsep ketatanegaraan, yakni: kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*) dan pembagian atau alokasi sumber daya (*resource*).¹⁸

¹⁷MD. Susilawati dkk, Cetakan Kedua, *Urgensi Pendidikan Moral Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*, (Yogyakarta: Surya Perkasa, 2010), hal. 209

¹⁸Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal, 28

Pada penelitian ini menggunakan teori yang bertujuan untuk menelusuri beberapa hal yang terkait erat dengan seorang tokoh seperti riwayat pendidikan, sebuah pemikiran dan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya yang lazim dikenal dengan nama teori biografik. Teori *behavioralisme* digunakan untuk menjelaskan dinamika perjalanan perilaku politik seseorang. Penggunaan teori ini sebagaimana yang diilustrasikan oleh Nasiwan bahwa paham ini menitikberatkan perhatiannya pada tindakan politik individu yang menonjol sejauh mana peranan pengetahuan politik seseorang sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya.¹⁹ Dalam perkembangannya, ada dua konsep behavioralis yang menjadi acuan dalam kerangka teorinya yaitu sebagai berikut: pertama, memfokuskan perhatian pada unit-unit politik seperti kelompok dan individu dengan menyelidiki tentang berbagai karakter, perilaku, dan organisasi unit-unit tersebut. Kedua, memusatkan perhatian pada proses politiknya, semacam konsentrasi yang diarahkan kepada berbagai peristiwa dan mencoba menjabarkan bagaimana sebuah fenomena politik terjadi. Menurut David Apter, bahwa teori *behaviorial* berusaha menjelaskan bagaimana menciptakan, mengubah, menyesuaikan dan mempelajari tingkah laku yang berkaitan dengan tindakan politik seseorang.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁹Nasiwan, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hal. 33

²⁰*Ibid*, hal. 44-46

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Metodologi penelitian adalah perangkat cara atau langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Maka penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk menjelaskan metode sejarah sebagai proses menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.²¹ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yakni: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berikut penjelasannya:

1. *Heuristik* (Pengumpulan Data)

Metode *heuristik* adalah tahap awal yang dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber dari topik yang akan diteliti dalam metode sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishen*, yang artinya memperoleh. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan terdahulu.²² Dalam pengumpulan sumber ini diklasifikasikan

²¹Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 103. Selanjutnya disebut *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*.

²²Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hal. 64. Selanjutnya disebut *Metode Penelitian Sejarah*.

menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²³

a. Sumber Primer

penelitian ini adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau pelaku sejarah. Sumber primer ini dapat berupa dokumen ataupun karya Mohammad Natsir serta melakukan survei kepustakaan (*library research*) tentang hasil karya Mohammad Natsir sebagai sumber primer yang digunakan.

b. Sumber Sekunder

Adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Dengan kata lain, sumber yang didapat bukan dari tangan pertama, tetapi dari tangan kedua atau orang lain yang membahas tentang Mohammad Natsir, yang dalam hal ini menjadi objek penelitian penulis.

Data-data ini (primer/sekunder) diperoleh melalui buku-buku karya Natsir maupun buku-buku yang dituliskan oleh orang lain terkait tentang objek penelitian, koleksi buku Natsir, searching google/website, artikel, opini, PDF, dan lainnya. Semua data yang ditemukan, kemudian dikumpulkan dengan teknik dokumentasi agar gejala-gejala sosial di masa lampau terungkap melalui buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

2. Verifikasi (Penilaian Data)

Metode ini mencoba untuk pertama, menganalisa keabsahan tentang keaslian

²³Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah Islam.*, hal. 104-105.

sumber (*otentisitas*) yang dilakukan melalui kritik sumber ekstern. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber, karena sumber yang dimaksud berbentuk dokumen maka yang menjadi sorotannya adalah kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan segi luarnya yang lain. Tahap kedua menganalisa keabsahan tentang kesahihan sumber (*kredibilitas*) yang akan ditelusuri melalui kritik intern. Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor yang paling sangat menentukan sah atau tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Kredibilitas suatu sumber baik yang tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua berisikan hal yang positif.²⁴

3. *Interpretasi* (Penafsiran Data/ Analisis Fakta Sejarah)

Merupakan tahapan yang ketiga, yang bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam interpretasi yang menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁵ Pada penelitian ini proses kolaborasi antara metode sejarah dengan pendekatan politik. Interpretasi data dilakukan melalui pendekatan politik dengan menggunakan analisa yang berasal dari teori.

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini, maka perlu diketahui bahwa pengertian teknik analisis data sendiri adalah proses penghimpunan atau

²⁴Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah Islam*, hal. 110-113

²⁵*Ibid*, hal.. 114

pengumpulan, pemodelan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung membuat keputusan.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni suatu analisis data yang digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁷ Setelah seluruh data terkumpul kemudian dilakukan seleksi untuk dianalisa sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Dengan demikian, teknik yang digunakan akan memperoleh gambaran hasil analisa mengenai etika politik Mohammad Natsir.

Sementara itu, untuk menganalisa data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut maka digunakan salah satu dalam metode sejarah yaitu melakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara termonologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.²⁸ Pada tahap ini, peneliti melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan etika politik Mohammad Natsir dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Peneliti

²⁶Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah.*, hal. 64

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 22.

²⁸Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah.*, hal. 64

akan melakukan perbandingan dengan data tersebut dan melakukan serangkaian secara abstrak untuk membentuk struktur penulisan yang baik.

3. *Historiografi* (Penulisan Sejarah)

Langkah terakhir dari dalam penelitian sejarah adalah historiografi.²⁹ Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan penulisan sejarah dengan tujuan hasil yang ditulis dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Berdasarkan penulisan tersebut akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya atau tidak, memiliki validitas dan rehabilitas yang memadai atau tidak, sehingga penulisan sejarah itu akan dapat ditentukan mutu penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik yaitu dimana dalam proses politik biasanya masalah kejadian politik, perang, diplomasi, tindakan-tindakan tokoh-tokoh politik dipandang sebagai faktor penentu dan senantiasa menjadi tolak ukur.³⁰ Untuk itu, penting diketahui klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah dibedakan oleh Max Weber dalam tiga jenis otoritas: (1) Otoritas karismatik yang didasarkan pada pengaruh dan kewibawaan pribadi, (2) Otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan dan, (3) Otoritas legal-rasional yang

²⁹Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, hal., 116

³⁰Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah.*, hal. 187

dimiliki berdasarkan jabatan dan kemampuannya.³¹ Dalam pengertian tersebut pendekatan dalam bidang politik sangat mutlak diperlukan apabila penelitian ini untuk mencari pemahaman kepribadian seorang nasionalis muslim intelektual khususnya etika politik Islam Indonesia: Studi atas konsep dan aksi politik Mohammad Natsir.

Sementara itu, dalam penelitian ini perlu pendekatan politik untuk memahami kondisi perpolitikan yang berhubungan dengan peristiwa yang dikaji, seperti kebijakan apa yang dikeluarkan Mohammad Natsir pada saat dibirokrat, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan politik bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi dizamannya pada masa Orde Lama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara singkat menggambarkan tentang format laporan penelitian yang akan disusun secara sistematis, terstruktur yang dikelompokkan terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun susunan sistematika penulisan penulis rincikan antara lain:

Bab satu berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara komprehensif. Oleh karena itu, pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, apa yang menjadi latar belakang masalah. Selanjutnya rumusan masalah dimaksud untuk

³¹*Ibid.*, hal. 18

mempertegas lebih dalam pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus. Kemudian dilanjutkan dengan adanya batasan masalah sehingga tidak melebar luas daripada rumusan masalah yang akan dibahas. Dalam tujuan, kegunaan penelitian untuk menjelaskan urgensi penulisan ini. Setelah itu dilakukannya tinjauan pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini. Sedangkan, kerangka ataupun landasan teori menjelaskan pendekatan apa yang dipakai pada penulisan ini. Serta metodologi penelitian untuk menjelaskan cara yang dilakukan penyusun dalam penelitian. Terakhir, sistematika penulisan berusaha mengorganisir secara gradual atau sistematis mulai dari pendahuluan hingga pada suatu kesimpulan.

Bab dua akan membahas gambaran umum yang berkaitan dengan pengertian etika, aliran-aliran etika, politik, penjelasan tentang etika politik dan etika politik dalam Islam.

Bab tiga memperkenalkan sosok Mohammad Natsir dan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yakni dan latar belakang hidup sosial, politik, pendidikan, karir politik dan karya-karyanya serta prestasi Mohammad Natsir.

Bab empat ini membahas tentang latar belakang pemikiran, etika politik Islam Indonesia: studi atas konsep dan aksi politik Mohammad Natsir sebagai birokrat saat di Menteri Penerangan, Mosi Integral, Perdana Menteri, sebagai politisi Partai Masyumi, Anggota Majelis Konstituante hingga keterlibatannya saat PRRI dan relevansinya terhadap kondisi saat ini.

Bab lima penulis memberikan kesimpulan umum dari penelitian ini secara komprehensif. Hal ini dimaksud sebagai penegasan atas jawaban permasalahan yang

telah dikemukakan. Kritik serta saran yang membangun diberikan kepada penulis dan terakhir daftar pustaka yang menjadi dasar rujukan peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ETIKA POLITIK

A. Pengertian Etika Politik

Dalam memahami pengertian etika politik, perlu dijelaskan lebih dahulu pengertian etika dan politik. Untuk memahami lebih dalam mengenai etika, perlu pula disinggung secara singkat aliran-aliran pemikiran yang terdapat dalam etika. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan pengertian politik. Berdasarkan hasil telaah terhadap istilah-istilah itu akan dilakukan telaah konvergensi, yaitu menggabungkan istilah-istilah tersebut untuk memperoleh pengertian etika politik secara utuh dan etika politik dalam Islam itu sendiri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam skripsi ini.

1. Pengertian Etika

Secara etimologis, etika mempelajari suatu kebiasaan manusia seperti cara berpakaian, tata cara, tata karma, *etiquette*.³² Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan.³³ Secara sederhana, etika, sebenarnya merupakan teori yang lahir dengan munculnya kesadaran individu, kelompok, dunia atau bahkan alam semesta. Etika membedakan dirinya dari disiplin filsafat ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah yang berprinsip pada yang benar dan salah. Etika juga tidak dapat disamakan dengan estetika yang berbicara

³²W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hal. 18. Selanjutnya disebut *Filsafat Moral*.

³³Siti Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Philosophy, Ethics, and Local Wisdom in the Moral Contruction of the Nation*, (Geneve: Globethics.net, 2013), hal. 18

tentang hal-hal yang indah dan yang cacat. Tetapi etika menempatkan dirinya sebagaimana hal yang baik dan buruk, karena itu etika adalah soal kebijakan.³⁴ Franz Magnis Soeseno berpendapat, etika saat ini menjadi relevan karena kehidupan manusia akan selalu terus menerus ditandai dengan pertarungan atau konflik antar kekuatan baik atau *good* dan kekuatan jahat atau *evil* yang tak ada habis-habisnya. Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan, maka disebut juga dengan sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan kewajiban dan tanggungjawabnya.³⁵ Sementara itu, menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.³⁶

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai yang benar atau salah yang dianut suatu masyarakat. Hadits riwayat Ahmad menyatakan bahwa pada suatu hari seorang sahabat Nabi bernama Wabishah bertanya kepada Nabi tentang *al-birr* (kebaikan) dan *al-itsm* (dosa, keburukan), yang kemudian Nabi menjawab sebagai berikut :

Hai Wahisbah, bertanyalah kepada hati nuranimu sendiri; kebaikan adalah sesuatu yang jika kau lakukan maka jiwamu merasa tenang, hati nuranimupun

³⁴Runi Hariantati, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*, (Jurnal: DEMOKRASI Vol. II No. 1, 2003), hal. 58

³⁵*Ibid.*, hal. 59

³⁶Rosihon Anwar, *Akhlaq Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 16

akan merasa tentram. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang jika kau lakukan maka jiwamu bergejolak dan hati nuranimupun berdebar-debar, meskipun orang banyak memberitahu kepadamu (lain dari yang kamu rasakan).³⁷

Kata lain dari etika adalah akhlak, dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti yang merupakan kata majemuk dari kata budi dan pekerti.³⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa intisari antara etika, moral dan akhlaq adalah sama-sama menentukan nilai-nilai mana yang baik dan buruk suatu sikap dan perbuatan. Perbedaan yang mendasar pada ketiganya adalah terletak pada standar dasar masing-masing. Bagi akhlaq standarnya adalah Al-qur'an dan Sunnah. Bagi etika standar dasarnya pada pertimbangan akal pikiran, dan moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.³⁹ Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa etika merupakan sumbangan terbesar Islam dalam pembangunan politik di Indonesia dan konsepsi dasar di bidang politik (keadilan, demokrasi, dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia)⁴⁰. Tentunya etika yang dibangun diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa yang artinya "*Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*" (Q.S. Ali-Imron : 3:110)

Etika setidaknya merujuk pada dua hal yakni sebagai berikut: Pertama, etika

³⁷E. Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013), hal. 37. Selanjutnya disebut *Etika Politik*.

³⁸Rahmad Jatnika, *Sistem Etika Islam: Akhlaq Mulia*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), hal 25

³⁹Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlaq*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal 9

⁴⁰Sabar Sitanggang dkk (Ed), *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hal. 10

berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan yang di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai yang hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.⁴¹ Secara epistemologis, pengertian etika dan moral memiliki kesamaan. Namun, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebiasaan di kalangan cendekiawan, ada beberapa pergeseran makna yang kemudian membedakannya. Etika sebagai cabang ilmu filsafat cenderung mempelajari benar dan salahnya suatu tindakan manusia. Sementara itu, moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “moral”. Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia.⁴²

Jadi, pada dasarnya yang menjadi tolok ukur pada etika adalah pikiran atau akal. Pada umumnya etika dapat diartikan bahwa sebagai usaha yang secara sistematis dengan menggunakan *rasio* untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial agar dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan pedoman dalam ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi.⁴³

⁴¹Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 7. Selanjutnya disebut *Etika Administrasi Negara*.

⁴²*Ibid.*, hal. 9

⁴³MD. Susilawati dkk., Cetakan Kedua, *Urgensi Pendidikan Moral Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*, (Yogyakarta: Surya Perkasa, 2010), hal. 209. Selanjutnya disebut *Urgensi Pendidikan Moral*.

Dari segi sumber-sumber etika secara umum berhubungan dengan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, tidak pula universal dan memiliki keterbatasan, serta dapat berubah.
- c. Dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebagai penilaian, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu berkaitan apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, dan hina.
- d. Begitu juga dari segi peranannya, etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Sehingga, dengan demikian peran etika dapat digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan manusia.
- e. Terakhir, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa Arabnya disebut "*Siyasyah*" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya "*Politics*". Politik itu

⁴⁴M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 325

sendiri memang berarti cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Namun, para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.⁴⁵ Pemahaman orang Yunani tentang “politik” boleh dikatakan amat demikian luas. Kata yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikannya sebagai “negara-kota” (*polis*), dan Arisoteles (384-322 S.M) merupakan orang pertama yang mengenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang “manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik”. Dengan itu, ia ingin menjelaskan, hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.⁴⁶

Pada abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, “politik” diartikan secara lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean Bodin (1530-1596), seorang filosof politik Perancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Tetapi, karena ia seorang pengacara, sorotannya mengenai ciri-ciri negara menyebabkan ilmu politik menjadi terkait dengan organisasi dari lembaga yang mempunyai sangkut-paut dengan hukum. Definisi politik yang lebih formal dan terbatas ini diperkukuh oleh filosof Prancis lainnya, yaitu Montesquieu (1689-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif.

⁴⁵Inu Kencana Syafi'i dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 6

⁴⁶Carlton Clymer Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 2. Selanjutnya disebut *Pengantar Ilmu Politik*.

Kategori tersebut mendapat tempat dalam konstitusi Amerika Serikat termasuk asumsi Montesquieu bahwa kebebasan akan lebih terjamin dengan adanya pembagian fungsi yang berbeda pada lembaga-lembaga pemerintahan yang terpisah (di Amerika Serikat: Kongres, eksekutif, dan pengadilan). Berdasarkan perspektif ini, bisa dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata dan sampai saat ini, pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakan dan menampung pertentangan timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang.⁴⁷

3. Etika Politik

Etika politik merupakan sebagai cabang dari etika sosial yang membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat negara (yang menganut sistem politik tertentu) berhubungan secara politik dengan seorang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu sendiri, seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi.⁴⁸

Etika politik didefinisikan sebagai “upaya hidup baik (memperjuangkan kepentingan publik) untuk dan bersama orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil” (P. Ricoeur, 1990). Ada tiga dimensi yang menjadi etika politik yakni tujuan (*policy*), sarana (*polity*), dan aksi

⁴⁷*Ibid.*, hal. 3

⁴⁸E. Herman Khaeron, *Etika Politik.*, hal. 15-16

politik (*politics*).⁴⁹ Etika politik juga salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Berbicara mengenai etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui bahwa saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa.⁵⁰

Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap

⁴⁹Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas dan Pejabat Publik dan Politisi*, (Yogyakarta: Kanusius, 2015), hal. 16

⁵⁰Prihatin Dwiwihantoro, *Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik*, (Jurnal: POLITIKA Vol. IV No. 2, Oktober 2013), hal. 13

munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan. Politik bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.⁵¹

Sedangkan dalam perspektif bangsa, sudah tentu adalah semua warga negara. Menurut UU RI No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁵² Dengan demikian, baik kepala negara, pejabat negara maupun warga negara merupakan komponen manusia atau pelaku yang terikat secara sukarela oleh komitmen terhadap suatu corak tertentu Etika Politik. Oleh karena itu, mempersoalkan etika politik berarti mempersoalkan etika kepala negara, etika pejabat negara dan etika warga negara.

4. Etika Politik dalam Islam

Dalam mendeskripsikan Etika Politik dalam konsep Islam, dapat ditempuh

⁵¹*Ibid.*, hal. 13

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

dengan pendekatan nilai; yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Menurut Nurcholish Madjid, bahwa dalam pandangan Islam, iman merupakan fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Iman melahirkan tata nilai berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, yaitu sebuah tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah.⁵³ Islam merupakan salah satu agama yang memberikan landasan yang kuat lagi kokoh bagi etika.⁵⁴ Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, yang berasal dari sumber ajaran pokok agama Islam, yakni Al-qur'an dan Hadits.

Muhammad Thahir Azhari berpendapat bahwa ada beberapa prinsip Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni, diantaranya, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.⁵⁵

1. Amanah

Amanah adalah sesuatu yg dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.⁵⁶ Al-qur'an telah menjelaskan dalam surah Al- Anfal: 27 artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dapat dipercayakan

⁵³Faisal Baasir, *Etika Politik dalam Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 132. Selanjutnya disebut *Etika Politik*.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 136

⁵⁵*Ibid.*, hal. 144

⁵⁶<https://www.kamusbesar.com/amanah>. Di akses pada 21 April 2017, pukul 09. 38 Wib

*kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.*⁵⁷

Secara substansial amanah merupakan kemampuan moral dan etika yang akan kemungkinan manusia membangun sikap positif dan menghilangkan sikap negatif. Dalam konteks kenegaraan, bahwa amanah dapat berupa kekuatan atau kepemimpinan. Sebab ia merupakan kekuatan atau kepemimpinan yang berasal dari pendelegasian atau pelimpahan kewenangan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh tanggungjawab, jujur, dan memegang teguh prinsip. Bercermin dengan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, amanah adalah dapat dipercaya atau diandalkan.⁵⁸ Hadist Abdillah bin Umar r.a bahwa Rasullallah pernah bersabda yang artinya:

“Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin, dan (setiap orang) bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Maka, seorang pemimpin besar yang memelihara manusia bertanggungjawab atas mereka. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggungjawab atas mereka. Adapun wanita bertanggungjawab memelihara anggota keluarga suaminya dan ia (akan) diminta pertanggungjawabannya atas mereka. hamba sahaya (seorang) memiliki tanggungjawab untuk memelihara harta kekayaan tuannya dan bertanggungjawab atas hal itu. Ketahuilah bahwa setiap orang diantara kalian (akan) diminta pertanggungjawab tentang piaraannya” (Ditarikhkan oleh Al-Bukhari dalam kitab al-Itq).⁵⁹

2. Musyawarah

⁵⁷Tim Syaamil Al-Qur'an, *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma, 2010), hal. 180. Selanjutnya disebut Syaamil Al-Qur'an

⁵⁸Said Aqil Husin Munawar, dkk., *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), hal. 8-9. Selanjutnya disebut *Islam Humanis*.

⁵⁹Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadist Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hal. 115-116

Musyawahar adalah suatu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, dan perembukan.⁶⁰ Prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an secara jelas mengatakan pada surah As-Syuraa ayat 38 Allah telah berfirman yang artinya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.*⁶¹

Oleh karena itu, bahwa musyawarah telah diajarkan Islam kepada manusia. Jadi, sangatlah peting bagi kita memutuskan suatu perkara dalam upaya membangun kehidupan sosial yang demokratis.

3. Keadilan Sosial

Agama Islam telah mengajarkan kepada ummat manusia untuk menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Allah berfirman yang artinya dalam surah Al-Maidah: 8 artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”.*⁶²

⁶⁰ <http://kbbi.kata.web.id/musyawahar/> di akses pada tanggal 21 April 2017, pukul 09.40 Wib

⁶¹ Syaamil Al-Qur'an, hal. 487

⁶² Syaamil Al-Qur'an, hal. 108

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an yang berisikan tentang keadilan, bahwa untuk menegakan keadilan tidak hanya berlaku untuk pemimpin yang mempunyai perjanjian atau kontrak dengan Tuhannya, tetapi menegakkan keadilan juga berlaku bagi setiap muslim apapun itu status sosialnya. Dalam kamus bahasa indonesia pun kata adil tidak jauh berbeda diartikan; tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶³

4. Persamaan

Persamaan adalah mempersamakan (tingginya, tingkatnya, dan sebagainya) : perlu diperjuangkan terus persamaan hak bagi semua orang.⁶⁴ Dalam Islam, prinsip persamaan bermakna luas. Persamaan juga mencakupi segala bidang kehidupan yang meliputi persamaan dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Sebagaiman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya:

“Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti”.⁶⁵

5. Perdamaian

Perdamaian berasal dari kata damai. Dalam KBBI mengartikan damai adalah tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tentram, dan rukun. Jadi perdamaian adalah

⁶³<http://kbbi.web.id/adil> diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 10.14 Wib

⁶⁴<http://kbbi.kata.web.id/persamaan/> di akses pada tanggal 21 April 2017, pukul 09.48 Wib

⁶⁵Syaamil Al-Qur'an, hal. 517

penghentian perselisihan atau permusuhan.⁶⁶ Pada hakikatnya perdamaian merupakan keinginan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama dalam hal menyelesaikan konflik tentunya harus dilakukan secara damai. Sementara itu, Agama Islam juga telah mengajarkan kepada manusia di muka bumi ini untuk mengutamakan perdamaian dan keselamatan di antara sesama manusia dan antar bangsa. Karena, keanekaragaman suku, bangsa dan budaya dijadikan Allah adalah untuk saling mengenal dan bekerjasama dengan menjaga dan memelihara perdamaian antara manusia. Dengan demikian, manusia di dalam Islam dituntut untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan kemunkaran. Karena, permusuhan dan peperangan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam. Al-qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan dan perang apabila pihak lain yang memulai serangan terhadap umat Islam. Hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya:

*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang melampaui batas”.*⁶⁷

6. Prinsip Kesejahteraan

Sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. yakni jauh dari gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya. Kesejahteraan tidak hanya mencakup pada lahir saja tapi juga batin untuk mencapai ridha Allah. Upaya mencapai kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, dan negara wajib melayani, memfasilitasi,

⁶⁶<http://kbbi.web.id/damai> diakses pada 23 Mei 2017, pukul 11.38 Wib

⁶⁷Q.S. Al-Baqarah : 190

mengayomi masyarakat untuk menjamin akan kebutuhan tersebut. Kesejahteraan lebih kongkritnya adalah negara yang “*baldatun thayyibatun warobbun ghafur*”, yaitu negeri yang sejahtera di bawah ridha Allah SWT. Tolok ukur Islam dalam kesejahteraan ini adalah bukan kesejahteraan personal, melainkan kesejahteraan sosial. Oleh kerana itu, Islam mengharuskan kepada para pemeluknya untuk mengeluarkan zakat, hibah, wakaf, sedekah, infak, dan lain sebagainya dengan tujuan agar tidak ada lagi kesenjangan sosial hingga kesejahteraan sosial yang benar-benar diperoleh.⁶⁸

Dalam kepedulian sosial, ayat Al-qur’an selalu mengingatkan kita bahwa setia rezeki yang kita miliki, itu ada hak orang lain yang membutuhkan dan harus ditunaikan. Allah SWT telah berfirman dalam suah Al-Ma’un 1-7 yang artinya:

“Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalatnya, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang riya’, dan mereka yang enggan (memberikan) bantuan.”⁶⁹

7. Prinsip Ketaatan Rakyat

Ketaatan berasal dari kata taat. Berdasarkan KBBI taat artinya senantiasa tunduk (kepada Tuhan, perintah, dan patuh).⁷⁰ Ketaatan rakyat pada pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju kepada kebenaran. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kesalahan maka rakyat berhak untuk mengkritik dari setiap kesalahan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa agar kembali pada jalur

⁶⁸*Etika Politik*, hal. 164-166

⁶⁹Syaamil Al-Qur’an, hal. 602

⁷⁰<http://kbbi.web.id/taat> diakses pada 23 Mei 2017, pukul 12.18 Wib

kebenaran. Sebagaiman Allah SWT berfirman QS. An-Nisaa ayat 59 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kau berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan asul (Sunah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”.*⁷¹

⁷¹Syaamil Al-Qur’an, hal. 87

BAB III

BIOGRAFI POLITIK MOHAMMAD NATSIR

A. Mohammad Natsir: Sebuah Biografi Singkat

Di sebuah kampung Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, lahirlah seorang anak bernama Mohammad Natsir tepatnya pada tanggal 17 Juli 1908. Menurut Yusuf Abdullah Puar, peristiwa ini bertepatan dengan tahun kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Soetomo.⁷² Setelah dewasa, Natsir bergelar Datok Sinaro Panjang. Pemberian gelar tersebut merupakan adat Minangkabau yang biasa dilakukan setelah akad nikah.⁷³ Natsir merupakan pasangan dari keluarga besar Mohammad Idris Sutan Saripado yang merupakan seorang juru tulis pada sebuah kantor Kontroler di Maninjau, dan ibunya bernama Khadijah.⁷⁴

Rudolf Mrazek dalam Waluyo mengatakan bahwa, ketika Natsir masih kecil pada malam hari ia tidur di Surau dengan kawan-kawan sebayanya. Anak-anak yang seusianya akan menjadi bahan ejekan kalau masih tidur di rumah. Kebiasaan yang demikian itu sudah menjadi budaya di daerah Minang yang sama halnya dengan kebiasaan merantau, bertempat tinggal di Surau merupakan bentuk rantauan juga. Dalam sejarahnya di Minangkabau, selain berfungsi sebagai rantau, Surau juga

⁷²Yusuf Adullah Puar, (ed.) dalam Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir Suatu Tinjauan dalam Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta, Idea Press, 2015), hal. 13. Selanjutnya disebut *Konsep Negara Menurut M. Natsir*.

⁷³*Ibid.*, hal. 13

⁷⁴Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 21. Selanjutnya disebut *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*.

merupakan tempat untuk mengartikulasikan ketidaksetujuan dengan ide-ide yang baru.⁷⁵

Selain itu juga, bukan hanya pendidikan agama yang orang tua tanamkan kepada Natsir, melainkan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya untuk dapat sekolah. Namun, karena keterbatasan dengan kondisi ekonomi orang tuanya membuat Natsir hanya kurang dari satu tahun bersekolah di HIS Adabiyah Padang, hingga ayahnya menjemput Natsir untuk sekolahnya di HIS Pemerintah di Solok. Disini Natsir menumpang di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Dari HIS Solok kemudian Natsir pindah ke HIS Pemerintah di Padang. Disini sama seperti waktu di Solok belajar di sekolah formal ia tetap aktif mengikuti berbagai pelajaran-pelajaran terutama keislaman yang disampaikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Watak yang keras dan keuletannya tampak tatkala ia menempuh tiga pelajaran sekaligus dalam satu hari. Pagi, ia masuk menempuh pelajaran disekolah *Hollads Inlande School*. Sore hari, di Madrasah Diniyah, ia mempelajari bahasa Arab dan pada malam harinya ia mengaji dan belajar kitab kuning. Basis spiritual yang kuat pada lingkungan itulah yang sangat terkenal sebagai pemeluk Islam yang taat adalah sebagai modal yang sangat berharga dan tak ternilai bagi Natsir. Dengan lingkungan yang sangat religius itu pula yang sangat mempengaruhi pola sikap Natsir dalam setiap tindakan dan pemikirannya serta sebagai bekal hidup.⁷⁶

Selama pada tahun 1923-1927 di Padang kegiatan sekolah yang telah

⁷⁵Waluyo, *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 15. Selanjutnya disebut *Dari "Pemberontak"*.

⁷⁶*Ibid.*, hal, 16-17

ditempuhnya adalah di MULO.⁷⁷ Pernah terpikirkan oleh benaknya untuk segera cepat selesai kegiatan belajarnya supaya bisa membantu ayah dan ibunya. Namun karena akan haus akan ilmu pengetahuan, terjadi pertentangan bathin pada diri Natsir. Namun, hal ini tidaklah berlangsung lama disebabkan atas dukungan restu orang tuanya dan keinginan ayah dan ibunya yang sesuai dengan hasrat hati untuk melanjutkan Natsir sekolah. Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) Padang. Disamping itu, Natsir telah bergabung di pandu “*Natipij*” dari perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB). Maka, dari berorganisasi inilah Natsir mulai membuka cara pandangya mengenai kondisi bangsa dan wacana politik yang tengah berlangsung saat itu, adalah suatu kenyataan bahwa bangsanya tengah diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa kolonial.⁷⁸

Perkumpulan itu sejenis gerakan dengan Pelajar Islam Indonesia (PII). Disinilah Natsir sempat berkenalan beberapa tokoh, seperti sastrawan Sanusi Pane. Perkumpulan tersebut bukanlah berbau politik, akan tetapi semua menimbulkan kesadaran akan harga diri mengabdikan golongan dan pemerintah Belanda. Banyak dari pemimpin kita sekarang yang telah mendapatkan latihan dari perkumpulan tersebut ungkap Natsir, seperti: Bahder Johan, Mohammad Yamin, Muhammad Roem, Yusuf Wibisono, Wiwoho Purbohadijoyo, Prawoto Mangkusasmito, dan banyak lainnya. Mereka juga pernah terlahir dan dididik dari organisasi pemuda tersebut.⁷⁹

⁷⁷Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam : Soekarno vs Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hal. 32-33. Selanjutnya disebut *Polemik Negara Islam*.

⁷⁸Waluyo, *Dari “Pemberontak”*, hal. 18

⁷⁹Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir*, hal. 17

Perjalanannya pun lanjut menuju Kota Bandung dalam rangka melanjutkan studi adalah sebuah perjalanan hidup yang sangat menentukan. Berbekal beasiswa ia dapatkan untuk melanjutkan studi pendidikan di *Algemene Middelbare School* (AMS) Afdelling A di Bandung pada tahun 1927, merupakan hal yang sangat langka bisa diperoleh seorang pribumi anak pegawai rendah. AMS adalah sekolah menengah umum setingkat sekolah menengah atas tergolong sekolah elit dan mahal. Tentu saja sekolah tersebut hanya anak orang yang berpangkat tinggi yang bisa masuk, dan Natsir termasuk yang beruntung bisa masuk sekolah tersebut. Di Bandung, Natsir tinggal bersama bibinya Etek Latifah di jalan Cipahit, Bandung, yang keberadaannya tidak jauh dari sekolah AMS.⁸⁰ Selain sebagai pelajar di AMS Bandung, ia juga mendapatkan pendidikan tambahan dan aktif dipergerakan Islam dan belajar politik di perkumpulan JIB, sebuah organisasi pemuda Islam yang anggotanya adalah pelajar-pelajar Bumi Putra yang bersekolah di sekolah Belanda. Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Haji Agus Salim. Sebuah keuntungan besar bagi Natsir bahwa dalam usia 20 tahun sudah berjumpa dan berdiskusi dengan para tokoh nasional, antara lain: Mohammad Hatta, Prawoto Mangkusasmito, Sjafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono, Tjokroaminoto dan Mohammad Roem. Ia diakui sebagai tokoh handal sebagai pemikir, intelektual, pujangga, dan negarawan. Ia tidak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, tetapi ia juga bertindak secara nyata. Dengan kemampuan yang dimilikinya mampu mengantarkan ia pada saat itu tepatnya pada 1928, Natsir terpilih menjadi ketua cabang JIB

⁸⁰M. Natsir, *Politik Santun.*, hal. 16 – 17

Bandung hingga 1932.⁸¹

Kedudukan sebagai pimpinan organisasi inilah yang membuat kemampuan politiknya semakin terasah. Dengan demikian, kegiatan tersebut telah mempengaruhi jiwanya untuk memperoleh gelar *Master in de Rechten* (Mr.).⁸² Setelah belajar di AMS, Natsir mendapatkan kesempatan untuk meneruskan pendidikannya ke *Rechts Hogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau ke *Handels Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Akan tetapi, ia menolaknya dan lebih memilih usaha untuk memajukan pendidikan dan mengajar pelajaran agama di beberapa sekolah menengah, seperti di sekolah MULO *Javastraat* Bandung dan sekolah guru di Gunung Sahari Lembang. Hal ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajarkan agama yang pada masa itu dirasakan belum memadai. Untuk mempertajamkan pemikiran dan keilmuannya, ia mengikuti kursus guru diploma L.O (*Langer Onderwfs*), dan tamat pada tahun 1932. Kemudian ia mendirikan *Pendis* (Pendidikan Islam), yaitu suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren pada tahun 1932.⁸³

Dalam tulisan Solichin Salam sebagaimana dikutip oleh Ris'an Rusli bahwa Natsir menikah dengan Nur Nahar pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung. Dari

⁸¹Yusril Ihza Mahendra dalam Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal. 23–24.

⁸²Gelar akademik yang diberikan setelah tamat belajar di fakultas hukum dan fakultas ekonomi di Jakarta, atau di Roterdam Belanda. Nilai ijazahnya AMS. Mohammad Natsir bagus dan memungkinkan untuk mendapat beasiswa kesalah satu fakultas tersebut. Lihat Yusuf A, Puar, *Mohammad Natsir 70 Tahun*, hal. 20. Lihat juga dalam Thohir Luth, *Ibid.*,hal. 23

⁸³Waluyo, *Dari "Pemberontak"*, hal. 23-24

buah perkawinannya, ia dikaruniai enam anak beserta tanggal kelahirannya yaitu: Siti Muslihah (20 Maret 1936), Abu Hanifah (29 April 1937), Asma Farida (17 Maret 1939), Hasna Faizah (5 Mei 1941), Asyatul Arsyah (20 Mei 1942) dan Ahmad Fauzi (26 April 1944).⁸⁴ Natsir meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1993 bertepatan dengan 14 Sya'ban 1413 H di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta diusianya yang ke 85 tahun. Natsir (alm) jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum (TPU) Karet Jakarta setelah menderita penyakit komplikasi *bronchitis*, gangguan pernafasan (asma) dan penyumbatan saluran kencing (*prostat*). Sebagai ulama kharismatik sekaligus negarawan yang tetap konsisten dalam menjalankan ajaran Islam dan pengembangan sumber daya manusia membuat seorang mantan Perdana Menteri Jepang yang pada saat itu diwakili Nakajima pernah mengatakan “berita wafatnya Bapak Natsir terasa lebih dahsyat dari pada jatuhnya bom atom di Hiroshima.”⁸⁵

B. Karir Politik Mohammad Natsir

Mohammad Natsir mulai aktif dibidang politik dengan melibatkan diri sebagai anggota Persatuan Islam (Persis). Peristiwa ini tercatat dalam sejarah hidup Natsir sebagai peristiwa yang menariknya kedalam gerakan perjuangan Persis yang

⁸⁴Thohir Luth, *M Natsir Dakwah dan Pemikiannya*, hal. 27

⁸⁵Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi. Mohammad Natsir.*, hal. 35

dipimpin oleh Ahmad Hasan.⁸⁶ Persis dibentuk pada tanggal 12 September 1923 oleh H. Zamzam, H. Muhammad Yunus dan A. Hasan di Bandung.⁸⁷ Pada tahun 1938, Natsir mulai aktif di bidang politik dan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Dua tahun setelahnya, ia pun menjabat sebagai ketua PII cabang Bandung pada tahun 1940 hingga 1942. Kemudian setelah itu, Natsir pun bekerja paruh waktu di pemerintahan sebagai biro pendidikan Kota Bandung. Tahun 1945, Natsir merangkap menduduki jabatan sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.⁸⁸

Sementara itu, Jepang merasa perlu merangkul Islam. Maka, dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan organisasi politik Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi tersebut berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 7 November 1945 hingga mengantarkan Natsir sebagai salah satu ketuanya tahun 1949 sampai 1958 hingga partai Masyumi dibubarkan.⁸⁹ Tujuan Masyumi sejak dibentuk, secara garis besar, terdapat tiga lapangan kiprah Masyumi, yaitu lapangan parlementer, lapangan pemerintahan dan lapangan pembinaan umat. Dari tiga lapangan Masyumi tersebut, pada bagian pertama dan kedua merupakan fungsi Masyumi sebagai partai politik di tingkat suprastruktur, sedangkan bagian ketiga merupakan peran Masyumi di tingkat infrastruktur. Pada lapangan parlementer,

⁸⁶Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam.*, hal. 35

⁸⁷*Ibid.*, hal. 35 - 36

⁸⁸Yusril Ihza Mahendra, dalam Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal. 24

⁸⁹*Ibid.*, hal 24

Masyumi “berperang” dilembaga-lembaga DPR di pusat dan daerah sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sarana yang lazim dalam negara demokrasi. Di lapangan pemerintah, Masyumi berjuang untuk mendapatkan kedudukan dalam kabinet dan aparatur pemerintah lainnya. Di lapangan umat, Masyumi membangun fungsi partai politikya dengan menyusun tenaga umat yang tersebar dalam berbagai organisasi massa Masyumi di tingkat akar rumput atau *grass root*.⁹⁰

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Natsir tampil sebagai seorang politisi dan pemimpin negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Herbeth Feith, bahwa Natsir adalah salah satu seorang menteri dan perdana menteri yang terkenal sebagai administrator yang mampu dan yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka, bahkan Bung Karno mengakui kemampuan Natsir sebagai administrator.⁹¹ Demikian juga Bung Hatta. Setelah Indonesia merdeka, ia dipercaya sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ketika Perdana Menteri Sutan Syahrir memerlukan dukungan Islam untuk kabinetnya, ia diminta sebagai Menteri Penerangan. Bung Karno yang pernah menjadi lawan polemiknya pada tahun 1930 sama sekali tidak keberatan atas gagasan Syahrir menunjuk Natsir menjadi Menteri Penerangan. Bung Karno tidak keberatan hal itu justru mengatakan “*Hij is de Man*” (dialah orangnya). Sementara itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan kesaksian bahwa Bung

⁹⁰Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hal. 40

⁹¹Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan detail antara karier Mohammad Natsir sebagai administrator, lihat Herber Feith, *The Decline Constituonal Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell Universisty Press, 1964) hal. 146-176. Lihat Thohir Luth. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. hal. 24

Karno tidak akan pernah mau menandatangani sesuatu keterangan pemerintah, kalau bukan Mohammad Natsir yang menyusunnnya.⁹² Karir politik Natsir pasca kemerdekaan diawali sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berlangsung dari tahun 1945-1946. Kemudian, Natsir menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia pada Kabinet Syahrir pada tahun 1946-1947, dan kabinet Hatta pada tahun 1948.⁹³

Puncak karir Natsir pun dalam bidang politik terus naik ke permukaan public khusus di pemerintahan, Natsir pun diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia (1950-1951). Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 Natsir terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dari tahun 1956-1958, ia menjadi anggota Konstituante Republik Indonesia.⁹⁴ Sebagai pemimpin politik Islam, sejarah perjuangan politik Natsir telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya bagi kepentingan seluruh umat Islam di Indonesia pada khususnya dan pada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan munculnya konsep pemikiran untuk menyatukan masing-masing negara bagian untuk bersatu kembali dalam Negara Kesatuan RI, yang telah dibicarakan terlebih dahulu dalam Dewan Pimpinan Partai Masyumi. Natsir dan Masyumi mengemukakan bahwa soal yang pokok adalah pembentukan negara kesatuan. Tak soal apakah negara kesatuan itu tercapai dengan penggabungan negara-negara bagian ke RI atau melalui RIS. Sementara itu, yang

⁹²*Ibid.*, hal. 24 -25

⁹³Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir.*, hal. 21-22

⁹⁴M. Natsir, *Capita Selecta*, Jilid I (Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi, 2008), hal, 622. Selanjutnya disebut *Jilid I*.

perlu digarisbawahi Natsir adalah, bahwa pembentukan negara kesatuan hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian maupun di antara golongan-golongan masyarakat pada umumnya.⁹⁵

Sementara itu, Natsir juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menyelamatkan NKRI. Natsir, telah berhasil mempersatukan negara-negara bagian yang dibentuk Van Mook ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Indonesia baru saja merdeka, Belanda masih tetap tidak mau mengakui Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat. Belanda, bahkan bersikeras untuk kembali menjajah. Dengan berbagai upaya, baik provokasi militer dalam Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1949) maupun diplomasi, Belanda berusaha memecah belah rakyat dan para pemimpin bangsa Indonesia. Hasilnya, Belanda berhasil memecah Indonesia yang bulat dan bersatu ke dalam beberapa negara bagian. Negara Republik Indonesia dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian kecil yang wilayahnya terbatas hanya di Yogyakarta dan sekitarnya. Negara-negara bagian lainnya, hasil ciptaan Van Mook, antara lain Negara Bagian Pasundan, Negara Bagian Jawa Timur, Negara Bagian Madura, Negara Bagian Sumatera Timur, Negara Bagian Sumatera Selatan, Negara Bagian Indonesia Timur, Negara Bagian Borneo Timur, dan Negara Bagian Dayak Besar. Dengan cara itu, Belanda masih dapat menguasai Indonesia. Negara bagian demi negara bagian, satu persatu masuk ke dalam kekuasaannya. Akibatnya, tidak jarang, negara bagian yang

⁹⁵Fidaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik*, (Jakarta: Millennium Publisher), hal. 168. Selanjutnya disebut *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup*.

satu dengan yang lainnya saling mencurigai, bahkan bermusuhan.⁹⁶

Melihat keadaan yang demikian, dalam sidang parlemen gabungan Negara Republik Indonesia (RI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS), Natsir saat itu sebagai anggota parlemen dari Masyumi. Maka, pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi kesatuan, konsep itulah yang populer dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Mosi inilah yang mengantarkan masing-masing negara bagian, untuk bersatu kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh mosi ini, diakui secara umum, sangat strategis bagi perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berawal dari mosi ini pula, Indonesia dapat kembali menjadi negara kesatuan yang bulat dan kokoh. Politik pengelburan dan penggabungan itu membawa pengaruh besar tentang jalannya politik umum di dalam negeri dari pemerintahan di seluruh Indonesia. Oleh pemerintah dan parlemen RIS dan RI, mosi integral Natsir ini diterima secara bulat, sehingga Bung Karno, pada tanggal 15 Agustus 1950, merasa perlu untuk mengumumkan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Sejak saat itu, gugurlah negara-negara boneka buatan Belanda. Natsir yang telah mencetuskan adanya mosi itu, oleh Presiden Soekarno, diberi kepercayaan untuk menyusun dan memimpin pemerintahan Republik Indonesia pertama setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Ketika ditanya Bung Hatta soal siapa yang akan menjadi formatur kabinet, Bung Karno menyatakan, siapa lagi kalau bukan

⁹⁶<http://www.setneg.go.id> dihasilkan 11 November 2016 pukul 10.50 dalam tulisan Yusril Ihza Mahendra, *Menyelamatkan NKRI: Berkaca pada Peran Syafoeddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir* diposting pada Jum'at 09 Februari 2007. Selanjutnya disebut *Menyelamatkan NKRI*.

Natsir.⁹⁷

Ketika dipercaya membentuk kabinet Negara Kesatuan oleh Presiden Soekarno pada bulan September 1950, Natsir agak risau. Sebab, Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai besar tidak bersedia duduk di kabinet, karena PNI menganggap mereka lebih tepat memimpin pemerintahan. Namun, Soekarno yang juga pendiri PNI tetap bersikeras meminta Natsir membentuk kabinet. “Tanpa PNI,?” tanya Natsir. Ya, tanpa PNI jawab Bung Karno tegas. Dari 18 portofolio kabinet, termasuk jabatan perdana menteri yang dipegang Natsir, hanya terdapat empat orang dari Masyumi (22,22 persen). Selebihnya dari PSI, PIR, Parindra, Katolik, Parkindo, PSII dan tokoh nonpartai, seperti: Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri, Ir. Juanda, Mr. Asaat, Dr. A. Halim, dan Dr. Bahder Djohan. Kabinet itu dianggap sebagai kabinet *zaken*. Sedangkan PNI menjadi partai oposisi.⁹⁸ Bahkan, pernah menurut A.H. Nasution, ide Natsir ini kemudian dijadikan doktrin ABRI, sebab ide itu sesuai dengan doktrin tentara, yang tidak hanya bertempur, tetapi terus menggali dukungan rakyat. Mosi integral merupakan debut politik Natsir yang amat cemerlang yang sampai sekarang Indonesia menjadi satu dan kokoh.⁹⁹

Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno pada tahun 1958, Natsir secara tegas menyatakan sikap tetap menentang politik pemerintah. Kondisi inilah yang mendorong Natsir kemudian bergabung bersama rekan seperjuangannya untuk membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat,

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi. Mohammad Natsir.*, hal. 48-49

adalah suatu bentuk pemerintah tandingan. Mereka menilai bahwa pemerintahan saat itu dibawah Presiden Soekarno saat ini secara garis besar telah menyeleweng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai akibat dari tindakannya itu, Natsir dan keterlibatannya bersama tokoh-tokohnya seperti: Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Pada saat PRRI itu, yang didominasi anggota Masyumi ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Batu-Malang (1962-1964), sementara yang lainnya tersebar di berbagai penjara di Pulau Jawa. Partai Masyumi kemudian dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 melalui pidato Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1960. Natsir kemudian dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah Pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru.¹⁰⁰ Ketika pemerintah Orde Baru muncul ke permukaan, Natsir juga tidak diberi sedikitpun ruang kesempatan untuk memimpin negeri ini. Ia terisolasi bukan karena sebuah keraguan orang terhadap kredibilitas dan kemampuannya, melainkan masalah ideologi yang menyebabkan pemerintah Orde Baru tidak menginginkannya.

Dalam keadaan yang demikian, Natsir meneruskan perjuangannya dengan menggunakan media dakwah yang dibentuknya bersama orang mantan Masyumi untuk mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tanggal 26 Februari 1967,¹⁰¹ sebagai wadah perjuangan baru. Melalui wadah inilah, ia memimpin, membina, dan melaksanakan berbagai kegiatan dakwah di Indonesia dan tak lagi berkecimpung di kegiatan politik. Lewat wadah inilah hubungan Natsir

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 32-33

¹⁰¹Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi. Mohammad Natsir.*, hal. 53

dengan dunia Islam internasional makin meluas dalam relasinya.¹⁰²

Natsir memilih dakwah sebagai wadah perjuangannya bukan merupakan suatu kebetulan belaka, melainkan sebagai alternatif lain sesudah perjuangannya melalui politik dibubarkan oleh Pemerintahan Soekarno. Ada beberapa alasan indikasi yang dapat dijadikan bahwa perjalanan dakwahnya merupakan perpanjangan tangan setelah mengalami kegagalan secara politis, yakni sebagai berikut: *Pertama*, setelah Orde Baru, Natsir dan kawan-kawannya ingin memunculkan kembali peran politik Masyumi, meskipun tak direstui oleh pemerintah. *Kedua*, adanya rapat dan kesepakatan pada tahun 1967 yang di prakarsai oleh Natsir beserta mantan tokoh Masyumi yang berniat mendirikan DDII dan M Natsir di tunjuk sebagai ketua umum hingga wafatnya. *Ketiga*, kantor sekretariat DDII yang menjadi pusat kegiatan adalah bekas kantor Masyumi. *Keempat*, kepengurusan DDII kebanyakan terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi.¹⁰³ Adapun kegiatannya antara lain: berfokus pada pembangunan masjid, pengiriman da'i-da'i ke berbagai daerah hingga penerbitan sebagai media dakwah (*Suara Masjid, Mimbar Jum'at, dan Tabloid*).¹⁰⁴

Pada level internasional, Natsir merupakan tokoh yang terkenal. Pada tahun 1956 Natsir, bersama Maulana Abu A'la Al-Maududi (Lahore) dan Abu Hasan Ali Nadwi memimpin sidang Alam Islami di Damaskus. Selain itu, Natsir juga menjabat sebagai wakil Presiden Kongres Islam sedunia yang berpusat di Pakistan dan

¹⁰²Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*., hal. 54

¹⁰³Mereka itu antara lain M Natsir, Prawoto Mangkusasmito, H Zainal Abidin Ahmad, M Rasyidi, KH. Hasan Basri, Oesman Ralibi, Burhanuddin Harahap dan lain-lain. Lihat di Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*., hal. 55

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 58 - 60

Muktamar Alam Islamy yang berpusat di Arab Saudi.¹⁰⁵ Di mata internasional, Natsir dikenal sebagai pendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di Asia dan Afrika untuk selanjutnya menghimpun negara-negara tersebut dalam ikatan kerja sama negara-negara yang baru merdeka. Sebagai seorang tokoh pemimpin politik, Natsir kerap diminta pandangannya terhadap suatu persoalan, bukan saja oleh tokoh-tokoh Palestina Liberation Organisation (PLO), Mujahid Afghanistan, Moro, Bosnia, dan lainnya hingga tokoh-tokoh politik berasal dari, seperti: Jepang dan Thailand.¹⁰⁶

Pada masa Orde Baru pun Natsir yang konsisten itu tidaklah berubah sikapnya. Ia kembali menentang pemerintahan Soeharto sehingga menyebabkan hubungan Natsir dengan Pemerintahan Orde Baru saat itu kurang harmonis. Kritiknya yang tajam menyengat dan menunjuk langsung pada persoalan-persoalan yang mendasar, tetap menjadi aktivitas rutinnya. Keprihatinan terhadap para pemimpin, mendorong mereka untuk mengeluarkan “Pernyataan Keprihatinan” yang disusun oleh Slamet Bratanata, Menteri Pertambangan pertama Orde Baru. Ketika AM. Fatwa mendatangi Natsir, ternyata beliau setuju terhadap pernyataan yang telah dirumuskan tersebut. Atas keberaniannya mengoreksi Pemerintahan Orde Baru dan ikut menandatangani Petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980. Beberapa tokohpun ikut terlibat dalam penandatanganan Petisi tersebut yang berjumlah 50 tanda tangan. Salah satunya tokoh seperti: tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, mantan pejabat,

¹⁰⁵Shalichin Salam, *Wajah Nasional.*, hal. 132. Lihat di Ria'an Rusli, *Pemikiran Teologi Mohammad Natsir.*, hal. 33

¹⁰⁶Yusril Ihza Mahendra, *“Modernis Islam dan Demokrasi”*.,hal. 65. Lihat juga di Ria'an Rusli, *Pemikiran Teologi Mohammad Natsir.*, hal. 33

pengusaha, dan aktivis dan itu disampaikan kepada DPR pada saat itu ketua DPR adalah Daryatmo,¹⁰⁷ yang kemudian memberikan stempel “musuh utama” pemerintah Soeharto, menyebabkan Natsir dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan. Dari uraiannya, secara kronologis dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Petisi 50 dengan pernyataan keprihatinannya, sebenarnya adalah upaya konstitusional dari putra-putra bangsa untuk meluruskan Presiden Soeharto dari pernyataannya yang dinilai membingungkan masyarakat. *Kedua*, memfungsikan kembali hak-hak DPR RI sebagai wakil-wakil rakyat untuk berdialog dengan presiden sebagai mandataris DPR-MPR dalam rangka pemecahannya. *Ketiga*, sebagai bukti kesungguhan putra-putra bangsa atas keikutsertaan mereka didalam membangun negara, termasuk didalamnya menegur, meluruskan penguasa negara. *Keempat*, Petisi 50, baik langsung atau tidak, juga ikut menjaga stabilitas nasional. Tudingan presiden terhadap partai politik yang belum sepenuhnya percaya kepada Pancasila itu merupakan peluang yang mengundang konflik, karena pada umumnya partai-partai tersebut mempunyai massa yang juga terdiri atas anggota masyarakat yang berpengaruh. *Kelima*, sebenarnya tudingan presiden yang tidak transparan itu tidak perlu terjadi didalam negara Pancasila yang sangat menghargai demokrasi. Apalagi tudingan itu tidak dapat dibuktikan secara hukum.¹⁰⁸ Pencekalan ini pun terus berlangsung tanpa ada proses hukum yang jelas dari Pemerintahan Orde Baru, dan ini berjalan hingga M. Natsir dipanggil ke hadirat Allah SWT pada 6 Februari

¹⁰⁷Waluyo, *Dari "Pemberontak"*., hal. xxxiii

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 109

1993.¹⁰⁹

C. Karya dan Prestasi Mohammad Natsir

a. Karya - Karyanya

Sebagai seorang ulama', pejuang, politikus, mujahid dakwah, intelektual dan negarawan Natsir juga mempunyai karya ilmiah yang monumental. Adapun karya-karya ilmiahnya yang menyangkut masalah politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lain-lain.¹¹⁰ Berbagai buku, artikel serta yang lainnya menurut penulis merupakan kumpulan tulisan lepas yang dibukukan menjadi satu kesatuan dalam bentuk buku. Buku-buku tersebut, diantaranya, adalah sebagai berikut:

Komt tot he Gebeid 1931, *Muhammad als Profeet* 1931, *Gouden Regel uit den Qur'an* 1932, *De Islamleestische Vrouw en Haar Recht* 1933, yang sengaja dibuat dalam bahasa Belanda dengan dimaksud untuk pemuda-pemudi yang tergabung dalam JIB. Adapun karya dalam bahasa Indonesia yang pertama kalinya adalah *Cultur Islam*, yang dibukukan oleh C.P Wolf Kemal Schoemaker pada 1931. Tulisan tersebut penting menurut Soekarno bagi kalangan intelektual Indonesia pada saat itu lebih menguasai dan menghargai tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda. Dari tulisan berbahasa Indonesia itulah karya Natsir dihargai dengan penghargaan yang tinggi oleh Soekarno.¹¹¹

¹⁰⁹M. Natsir, *Politik Santun.*, hal. 5

¹¹⁰Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal 28

¹¹¹http://www.kompasiana.com/amfatwa/pemikiran-m-natsir-dan-kontribusinya-dalam-pembangunan-negara-kesatuan-1_55123cc1a33311dd56ba8011. Di akses pada 26 April 2017 pukul 14.37 WIB

Sebenarnya, banyak tulisan ataupun naskah percikan pemikiran kritis Natsir telah terhimpun kedalam bukunya *Capita Selecta* secara lengkap baik itu tentang keislaman, dakwah Islam hingga politik sekalipun.¹¹² Adapun rincian tulisan lepas naskah tersebut telah dibukukan kedalam tiga jilid yakni diantaranya: Jilid I dituliskan Natsir pada tahun 1936-1941 yang berisikan tentang kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama, ketatanegaraan hingga bunga rampai. Jilid II merupakan tulisan, pidato dan interview Natsir tahun 1950-1955. Salah satu tulisan dalam jilid ini yang sangat monumental yakni Mosi Integral Natsir. Terakhir, jilid III memuat pidatonya dari tahun 1956-1960 yang isinya sangat memberikan argumentasi tajam dan kokoh dalam memberikan kritik terhadap pemerintah saat itu yang cenderung otoriter.¹¹³ Hingga saat ini buku *Capita Selecta* karya Natsir baik jilid I, II, dan III telah mendapatkan sambutan yang baik oleh masyarakat luas dan tentunya kalangan akademisi. Kehadiran dari hasil karya nyata Natsir kini telah diperbaharui dengan bahasa Indonesia yang baku tanpa sedikitpun merubah makna dari substansinya. Buku tersebut terakhir direvisi pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Yayasan Bulan Bintang Abadi.

b. Prestasi

Dalam kiprahnya, Natsir juga banyak mendapatkan sambutan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang pernah ia torehkan dalam sejarah masa hidupnya baik tingkat nasional hingga internasional. Adapun penghargaan tersebut diantaranya

¹¹²Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal. 15-19

¹¹³M Natsir, *Capita Celecta Jilid III*, (Jakarta: Abadi, 2008), hal. Iii. Selanjutnya disebut *Jilid III*.

sebagai berikut: *Pertama*, pada bulan Januari 1957, ia menerima bintang *Nichan Istikhar (Grand Gordon)* dari Presiden Tunisia, Lamine Bay atas jasa-jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. *Kedua*, Maret 1977, dari komunitas Muslim Dunia, mendapat gelar *Prince D'Islam* (Pangeran Islam) atas kontribusinya dalam memerangi kelaparan dan ketidakpedulian yang terjadi di dunia tanpa membeda-bedakan. *Ketiga*, Februari 1980, menerima penghargaan Internasional (*Jaa-izatul Malik Faisal al-Alamiyah*) dari lembaga Hadiah Internasional Malik Faisal di Saudi Arabia, atas jasa-jasanya di bidang pengkhidmatan kepada Islam untuk tahun 1400 H. *Keempat*, meskipun ia telah meninggal, banyak prestasi yang ia dapatkan atas dedikasinya terhadap umat dan bangsa. Tepatnya pada tanggal 6 November 1998, ia menerima Bintang Republik Indonesia Adi Pradana dari Pemerintah Republik Indonesia. *Kelima*, 26 Mei 2005, ia juga menerima penghargaan dari Dewan Masjid Award sebagai tokoh Manajemen Masjid Indonesia. *Keenam*, pada tanggal 23 Desember 2005, menerima bintang penghargaan dari Presiden Republik Demokratik Nasional Aljazair PYM Abu Aziz Bouliqah, atas jasanya membantu perjuangan pembebasan Aljazair. *Ketujuh*, pada Mei 2007, ia menerima bintang keteladanan akhlak mulia tahun 2007 dari Komite Pusat Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia. *Kedelapan*, tepatnya September 2007, ia menerima penghargaan setulus-tulusnya atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan Dakwah Islam di Indonesia dan turut serta mendukung pendirian dan pengembangan Masjid Salman ITB.¹¹⁴ *Kesembilan*, ini merupakan prestasi

¹¹⁴M. Natsir, *Jilid I.*, hal. 623-624

terakhir kalinya ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya diusia 15 tahun setelah meninggalnya Natsir untuk diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Pengakuan pemerintah itu didapatkan pada November 2008.¹¹⁵

¹¹⁵Tim Redaksi, *Profil 143 Pahlawan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009), hal. 82

BAB IV

KAJIAN KRITIS ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA: STUDI ATAS KONSEP DAN AKSI POLITIK M. NATSIR (1908-1993)

A. Mohammad Natsir seorang Birokrat

Pada kajian bab sebelumnya, telah dipaparkan bahwa kiprah dalam sejarah perjuangan Natsir telah melewati sebuah perjalanan yang panjang diantara dua rezim mulai dari masa penjajahan, pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru. Natsir merupakan salah satu tokoh di antara sekian banyak tokoh pejuang Islam yang dalam sejarah Indonesia, terutama dalam sejarah Indonesia. Natsir adalah sosok pribadi yang penuh integritas. Pengabdianya dapat diakui telah banyak memberikan sumbangan yang begitu besar bagi bangsa Indonesia dan dalam posisinya sebagai cendekiawan, budayawan, tokoh politik dan negarawan sekaligus pemimpin umat.¹¹⁶ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan meneruskan cita-cita daripada pendiri bangsa serta bangsa akan besar jika orang-orang didalamnya juga berfikir besar dan berjiwa besar.

1. M. Natsir sebagai Menteri Penerangan: Sosok yang Idealis

Natsir terjun ke dalam perjuangan dalam artian formal dapat dikatakan baru. Namun ternyata siapa sangka ia mampu memposisikan perannya dengan tepat. Natsir menjabat Menteri Penerangan sejak 3 Januari 1946 – 3 Juli 1947 pada Kabinet

¹¹⁶Dzulfikridin. *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 56

Syahrir I, II, dan III hingga Kabinet Hatta sejak 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949.¹¹⁷

Pada saat Perdana Menteri Syahrir mengajukan nama Natsir kepada presiden untuk menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan, Natsir pun segera diperintahkan Soekarno untuk membuat proforma surat kepada Jawaharlar Nehru tentang soal politik, alhasil kinerjanya memuaskan Bung Karno.¹¹⁸ Menurut Ridwan Saidi, “karena Syahrir memerlukan dukungan umat Islam untuk kabinetnya dan Natsir dipandang cakap untuk mensosialisasikan kebijaksanaan Pemerintah RI”.

Natsir merupakan sosok negarawan yang sederhana, yang tidak meninggalkan kekayaan kepada anak-anaknya. Natsir sebagai pemimpin yang sederhana dan rendah hati. Ketika saat Natsir menjabat Menteri Penerangan di bawah Kabinet Hatta. Natsir tidak malu menjahit baju dinas yang robek, karena itulah satu-satunya baju dinas yang dimilikinya. Para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan baju agar tampak seperti menteri sungguhan. Bahkan, pernah rumah dijaga polisi dan sang Perdana Menteri selalu didampingi oleh pengawal hingga pemerintah menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak sarta tukang kebun. Baginya semua fasilitas yang ia miliki tidaklah membuatnya manja dan kepala besar.¹¹⁹

Sementara itu, sifat kejujurannya yang dimiliki Natsir saat menjadi pejabat negara. Ketika menjadi Menteri Penerangan pada awal 1946, mereka tinggal

¹¹⁷*Ibid.*, hal. 57

¹¹⁸Waluyo, *Dari “Pemberontak”*., hal. 57

¹¹⁹<https://www.islampos.com/muhammad-natsir-2-menteri-dengan-jas-bertambal-4972/di>
akses pada 14 Desember 2016 pukul 19.48

seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Yogyakarta, keluarga Natsir menumpang di Paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia, sekarang Jalan H. Agus Salim. Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di Jalan Jawa pada 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan dan mereka mengisi rumah itu dengan perabot bekas. Menurut Kahin, melihat penampilan Natsir hampir-hampir tak menunjukkan dirinya sebagai Menteri Penerangan. Natsir mengenakan jas penuh dengan tambalan di sana-sini dan belakangan ia juga tahu, para staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membeli baju buat Natsir.¹²⁰ Bayangkan sekelas seorang pejabat menteri rasanya tidak masuk akal dan jauh dibandingkan politisi saat ini yang cenderung memperkayakan diri maupun golongannya.

Natsir dalam tindakannya adalah sosok yang lebih condong mewujudkan gagasannya tentang negara Islam melalui jalan legal konstitusional. Beliau lebih memilih cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang tengah berlaku. Hal ini tentunya memudahkan beliau dalam menyampaikan pemikirannya dan menghindari pertentangan-pertentangan yang serius dengan berbagai komponen bangsa lainnya. Walaupun sistem politik yang sedang dijalankan tidak bersifat aspiratif dengan pemikirannya, Natsir lebih memilih

¹²⁰ <http://www.riauonline.co.id/nasional/read/2017/01/13/catatan-yudi-latif-ketuhanan-mohammad-natsir-3> di akses pada 17 Februari 2017 pukul 09.45

masuk ke dalam sistem politik tersebut dan mengubahnya dari dalam. Bentuk nyata perwujudan gagasan melalui jalur legal konstitusional ini ditampakkan dengan perjuangan yang dilakukan Natsir bersama-sama partai Masyumi. Masyumi bagi beliau merupakan sebuah kendaraan politik untuk turut berkecimpung dalam politik dan turut menentukan perjalanan bangsa.¹²¹

Bagi Natsir, dalam pemikirannya, Islam bukanlah semata-mata suatu agama, melainkan suatu pandangan hidup yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Islam adalah sumber perjuangan dan sumber penentang dari setiap macam penjajahan dan Islam tidak memisahkan antara Agama dan Negara.¹²²

Natsir berpendapat bahwa, negara bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk merealisasikan aturan-aturan yang terkandung di dalam Al-qur'an. Hal ini dalam pemikirannya didasarkan pada Al-qur'an surah *Adz-dzari'at* yang artinya: 56 artinya, "*Tidak Aku jadikan Jin dan manusia itu, hanyalah untuk mengabdikan kepada-Ku*".¹²³ Begitu juga dengan Pancasila, dalam pemikirannya dengan tegas mengatakan bahwa: Pancasila itu netral dan sekuler. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sangat kabur dan tidak bermakna apa-apa bagi umat Islam yang telah memiliki suatu ideologi yang pasti, jelas dan sempurna. Karenanya, Natsir mengidealisasikan adanya negara yang berdasar Islam. Dia menyakini bahwa hidup ini, dari lahir sampai mati, adalah totalitas di bawah kedaulatan Tuhan, termasuk kehidupan bernegara. Baginya pemikiran untuk memisahkan agama dan negara, menurutnya, sama sekali tidak dapat ditoleransikan oleh umat Islam karena bertentangan dengan ajaran kedaulatan Tuhan

¹²¹Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Mohammad Nasir tentang Hubungan Islam dan Negara*, hal. 1766-1767. Dalam *Jurnal Transnasional*, Vol 6, No 2 Februari 2015

¹²²M. Natsir, *Jilid I.*, hal. xvii

¹²³M. Natsir, *Agama dan Negara*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hal. 78

dan ajaran-ajaran Islam sebagai tempat kembali. Begitu juga pancasila baginya adalah buatan manusia, yang tidak cukup memberi pegangan, terutama dalam pemahaman tentang ketuhanan dan agama. Operasionalisasi dari gagasan negara Islam dalam konstitusi, penulis memahami Natsir memisahkan masalah ibadah dan muamalah. Hanyalah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah harga mati yang tak bisa ditawarkan. Tetapi muamalah bisa diatur atas dasar hukum yang harus disepakati oleh dua belah pihak secara demokrasi. Tidak bisa pihak Islam memaksakan kehendaknya. Hal inilah yang mendasari pemikiran dan tindakan Natsir, sebagaimana Allah berfirman: “*Dan hendaklah urusan mereka diputuskan dengan musyawarah*”, (Q.S. Asy- Syura: 38).¹²⁴ Natsir merupakan sebagai tokoh guru umat dalam mengingatkan atau menyampaikan dakwah termasuk juga dalam bidang politik. Natsir terjun ke dunia politik bukanlah hanya semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi melainkan ia berpolitik hanya untuk membawa ajaran dakwah Islamiyah agar etika dalam berpolitik tetap terjaga dan terpelihara. Sosok ia yang sangat teguh, konsisten pada prinsip pendiriannya dalam menjalankan dakwah politiknya walaupun berbagai macam tantangan dan hambatan yang menghadang, gocangan serta kemerosotan perpolitikan tetap tak mau surut dari posisinya sebagai penyampai dakwah.

Kepercayaanpun pernah diberikan Soekarno setelah melihat kepriawaian Natsir dalam diplomasi, selain karena intelektualitasnya yang tinggi dan aktivitasnya dalam berbagai organisasi. Natsir adalah seorang guru bangsa, pendidik ummat,

¹²⁴M.Natsir, *Capita Selecta II*, (Jakarta: Abadi, 2008), hal. 97. Selanjutnya disebut *Jilid II*.

mujahid dakwah, pejuang, politikus, dan negarawan. Kepiawaiannya dalam diplomasi dibuktikan keikutsertaannya dalam perundingan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Roem-Royen dalam kedudukannya sebagai Penasehat Delegasi dan hasil dari perjanjian tersebut Natsir pula yang ditugaskan untuk menjelaskannya kepada rakyat selaku Menteri Penerangan.¹²⁵

Natsir adalah pemimpin senior kalangan Islam yang disegani karena peranan politik dan keagamaan yang dilakukannya di dalam negeri, bahkan reputasinya diakui serta dihormati di dunia Internasional, khususnya negara-negara yang memiliki penganut Islam. Karena pengaruhnya yang kuat itu, ia sangat dibatasi aktivitasnya oleh pemerintahan Orde Baru.¹²⁶ Dalam konsep prakteknya, Natsir seorang yang berperilaku dan bersikap dalam setiap aktivitas politiknya menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam politik. Dalam aksi politiknya, Natsir adalah seorang idealis yang ingin menjalankan politik sesuai dengan semangat ajaran agama yang dianutnya, meskipun untuk itu harus menelan kekecewaan akibat prinsip dan pendiriannya yang lurus dan konsisten.¹²⁷

2. Mosi Integral Natsir: Sebuah Konsep Pemersatu Bangsa

Konsep politik pada mosi integral memiliki nilai yang penting bagi M. Natsir. Terlebih pada sebelumnya telah melakukan proses riset yang mendalam terhadap rakyat yang tersebar di daerah-daerah untuk diajak berdialog dengan harapan dapat

¹²⁵Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 59

¹²⁶Firdaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup.*, hal. 211-212

¹²⁷Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer.* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hal. 230

memberikan inspirasi bahkan mengubah kebijakan pemerintah. Konsep politik ini merupakan bentuk daripada pemersatu bangsa. Dimana mosi intergral ini menjadi vital dalam konteks politik sekalipun. Maka, hal ini sangatlah fundamental sebab mampu mengubah bentuk negara yang dibuat oleh orang banyak melalui sebuah pertemuan besar di Belanda, sementara itu harus dirubah oleh M. Natsir seorang sebagai pemilik tunggal daripada mosi tersebut. Dalam sejarahnya, menceritakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 di Kota Den Hagg¹²⁸ diadakan Konferensi Meja Bundar yang dihadiri oleh utusan atau delegasi Republik Indonesia diwakili oleh M. Hatta, delegasi Federal diwakili oleh Sultan Abdul Alkadri (Sultan Abdul Hamid II) dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.¹²⁹ Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil dari perundingan KMB, maka dilangsungkan penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesian Serikat.¹³⁰ Dimana Negara Republik di obrak-abrik oleh si penjajah Belanda. Republik yang sah, dibagi-bagi menjadi negara bagian akibat dari hasil Konferensi Meja Bundar. Belum lagi gangguan dari dalam sendiri akibat suburnya Partai Komunis Indonesia yang tentunya meracuni anak bangsa. Bangsa terpecah belah menjadikan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun, di

¹²⁸Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, (Jakarta: Mizan, 2013), hal. 104-105. selanjutnya disebut *Partai Masjumi*.

¹²⁹A.W. Widjaja, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Sejarah Lintasan Dua Dasawarsa 1945-1965*, (Jakarta : Fajar Agung, 1989), hal. 2. Selanjutnya disebut *Dekrit Presiden*.

¹³⁰Remy Madinier, *Partai Masjumi*. hal. 105

tengah polemik tersebut Natsir seorang negarawan tampil dan mampu menangkap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Selain menerima berbagai pengajuan penggabungan dari berbagai daerah, Natsir juga melakukan pendekatan-pendekatan intelektual yang cukup alot dan menyita waktu yang lama dengan kepala-kepala negara bagian dan ketua fraksi lainnya diparlemen untuk memusyawarahkan gagasan pemulihan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan dengan adanya demonstrasi agar negara-negara bagian bergabung dengan RI atau RIS dilikuidasi. Sistem federal dianggap rakyat hanyalah sebagai alat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia supaya mereka dapat menguasai kembali negeri ini.¹³¹ Sebagai pemimpin partai, Natsir dengan segala usaha untuk mengupayakan demokratisasi masyarakat yang tidak stabil dan bertanggungjawab untuk itu. Ia mengatakan:

“Kalau kita hanya bersikap menunggu tindakan dari pemerintah kalau hanya jadi penonton, itu adalah suatu tanda bahwa kita tidak insaf akan kedudukan kita sebagai warga daripada satu negara yang merdeka”.¹³²

Dilihat dari kasatmata, bahwa adanya negara-negara bagian itu sangat menguntungkan Belanda supaya bisa menguasai Indonesia sehingga tak jarang terjadi negara bagian satu dengan yang lainnya saling mencurigai dan bermusuhan. Belanda berhasil memecah belah rakyat dan pemimpin-pemimpinnya, sehingga Indonesia

¹³¹Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soekarno*, (Jakarta : Haji Masagung, 1989), hal.66. Selanjutnya disebut *Cakrawala Politik Era Soekarno*.

¹³²Remy Madinier, *Partai Masjumi*. hal. 106

yang bersatu bulat dipecah kedalam belasan negara bagian BFO¹³³, dan RI pun merupakan bagian kecil yang wilayahnya hanya di Yogya dan sekitarnya. Negara-negara bagian tersebut hasil ciptaan Van Mook, antaranya Negara Bagian Pasudan, Negara Bagian Jawa Timur, Negara Bagian Madura, Negara Bagian Sumatera Timur, Negara Bagian Sumatera Selatan, Negara Bagian Indonesia Timur, Negara Bagian Borneo Timur, Negara Bagian Borneo Tenggara, Negara Dayak Besar, dan lain-lain.¹³⁴ Dalam perjalanannya, hasil dari Konferensi Meja Bundar ternyata tidak berumur lama. Bentuk susunan federal bukan bentuk yang berakar kepada kehendak rakyat, akibatnya timbul tuntutan-tuntutan untuk kembali dalam bentuk kesatuan. Tuntutan ini pun semakin lama menjadi kuat sehingga pada akhirnya negara/ daerah-daerah bagian satu persatu menggabungkan diri kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya hanya tinggal tiga negara bagian saja yaitu, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.¹³⁵ Pada saat itu, menurut M. Natsir, masalah pokok yang harus dipecahkan adalah bagaimana membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat kondisi inilah, maka pada tanggal 3 April 1950, maka dalam pidatonya, ia cetuskan Mosi Integral yang bersejarah tersebut, dengan beberapa butir konsep politik yang tertuang dalam pemikirannya adalah yang penting semua negara-

¹³³BFO (*Bijeenkomst voor Federale Overleg*) adalah negara yang dibentuk oleh Belanda, yang berjumlah 15 negara. Tujuan negara bagian tersebut untuk memecah belah Indonesia, sehingga Belanda dapat terus mempertahankan pengaruhnya. Lihat A.W. Widjaja, *Dekrit Presiden.*, hal. 2

¹³⁴M. Natsir, *Pak Natsir 80 Tahun.*, hal. 159-160.

¹³⁵Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal.

negara bagian mendirikan NKRI melalui parlementer, tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya, dan masing-masing negara bagian merupakan bagian integral dari NKRI yang akan dibentuk. Berikut pidatonya berbunyi:

“menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat, yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik diwaktu yang akhir-akhir ini, dengan cara integral dan program yang tertentu”.¹³⁶

Dalam prakteknya, konsep ini telah menyatukan seluruh daerah dilakukan secara damai tanpa adanya pertumpahan darah dan itu mencerminkan bahwa konsep politiknya yang tertuang dalam mosi integral adalah sebuah aspirasi bersama sehingga dapat diterima semua kalangan. Mosi tersebut yang kemudian dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Didukung dan ditandatangani oleh Soebadio Sastrosastomo, Hamid Algadri, Sukiman, K. Werdojo, A.M. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Amelz, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, dan Siradjuddin Abbas. Mosi itu diterima pada oleh Parlemen RIS pada tanggal yang sama. Sesuai dengan Mosi Integral Natsir konferensi antara RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950-pun bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan.¹³⁷ Negara Indonesia pun kembali melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang mengenalnya dengan sebutan proklamasi Indonesia yang kedua setelah tanggal 17 Agustus 1945.¹³⁸

¹³⁶M. Natsir, *Jilid II.*, hal. 9

¹³⁷M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 69

¹³⁸Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, hal. 48

Sosok pencetus tersebut ialah tak lain Mohammad Natsir. Sementara itu, menurut Arnold Mononutu, seorang tokoh PNI mengatakan bahwa tanpa M Natsir, tidak ada NKRI ini. Pernyataan itu disepakati oleh K.H Misbach, Ketua MUI Jawa Timur, apabila tidak ada Mosi Integral hasil pemikiran Pak Natsir, tentu akan terjadi pemberontakan yang hebat antara negara-negara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu K.H Ali Yafie, mantan ketua umum MUI Pusat dan mantan Wakil Rois 'Am Syuriah PBNU menilai: (beliau itu republiken dan unitarisme, artinya pemimpin yang menghendaki kesatuan Indonesia". Ditambahkan oleh Zulkifli Halim "dengan mosi integral yang menyelamatkan Indonesia, tampak sosok Natsir yang cinta persatuan bangsa".¹³⁹ Nurcholish Madjid pun menilai, Mosi Integral Natsir merupakan kebijakan seorang pemimpin yang mampu menerobos masa-masa mendatang serta berhasil mengantisipasi perkembangan bangsa dan negaranya dengan pandangan yang jauh dan strategis.¹⁴⁰ Bahwa tidak ada salahnya dalam pandangan penulis bahwa Natsir melihat, menilai sesuatu itu dengan kasat mata yang sangat konstitusional. Namun sangat sayang, dalam buku-buku sejarah catatan tentang mosi integral ini tidak ditemukan bahkan tidak dimasukkan kedalam buku-buku sejarah Indonesia yang tentunya menjadi sebuah panutan, teladan bagi generasi muda khususnya. Di sisi lain, penulis berpendapat dalam penempatan catatan "mosi

¹³⁹Zulkifli Halim, *Natsir Muda ada di Malaysia*, Repulika, senin, 8 Februari 1993. Lihat di M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah.*, hal. 69

¹⁴⁰Nurcholis Majid, *Kita Kenang Pak Natsir*, Panji Masyarakat, Nomor 784 Tahun XXXIV, 1-10 Maret 1993, hal. 20. Mosi ini pun membuktikan bahwa Natsir adalah seorang nasionalis yang bisa bekerja sama dengan siapapun serta dari golongan dan agama manapun. Lihat di M Dzulfikriddin. *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 70

integral” tersebut ke dalam buku sejarah harus menempatkan pada posisinya. Mengapa demikian, karena hal inilah yang harus diluruskan dalam sejarah Indonesia bahwa NKRI merupakan hasil dari pemikiran Mohammad Natsir melalui proses demokratis, konstitusional dan cara hormat. Tidak salah apabila dikatakan bahwa wawasan nasionalisme Natsir sangat luas dan mempunyai pemikiran yang jernih untuk menyatukan negara bagian dan mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mosi integral ini dapat disimpulkan bahwa lahirnya NKRI tak lepas dari peran besar Natsir dalam mempersatukan negara-negara bagian kedalam negara kesatuan. Berkat perjuangan beliau negara Indonesia menjadi besar gagasan, dukungan dan aksi dari berbagai kalangan serta melakukan pendekatan-pendekatan secara manusiawi, intelektual dapat menangkap dari apa yang diinginkan di lubuk hati setiap insan. Hal yang paling penting dalam upaya menyakinkan orang lain adalah keyakinan diri dulu. Karena itu Natsir merasa yakin bahwa untuk kepentingan bangsa, ide brilian tersebut dapat diterima oleh fraksi.

3. M. Natsir Seorang Perdana Menteri: Sebuah Kepercayaan

Dengan kembalinya Republik Indonesia ke bentuk NKRI maka pemerintah pun harus diganti. Dalam pembentukan kabinet, presiden berwenang menunjuk seorang atau lebih untuk formatur. Formatur tidak selalu harus perdana menteri atau menteri. Ketika dalam pembentukan kabinet baru sesuai dengan UUDS 1950, Soekarno dengan tegas menjawab, “ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi”

yang mempunyai konsep dalam menyelamatkan republik melalui konstitusi.¹⁴¹

Pada saat menjadi Perdana Menteri Natsir pernah melakukan pendekatan-pendekatan secara manusiawi, intelektual agar ia mendapat dukungan dari parlemen. Namun, dalam perjalanannya, Mohammad Natsir agak sulit untuk berkompromi dengan PNI yang tidak ada titik temu diantara keduanya. Dua kali dia menemukan presiden untuk mengembalikan mandat sebagai formatur kabinet karena gagal mengajak PNI berkompromi. Soekarno pun tetap memerintahkan Natsir untuk segera membentuk kabinet, walaupun tanpa PNI kata Bung Karno. Hal yang sama juga disampaikan M. Hatta, sampai saat itu Natsir tetap menjadi favorit Bung Karno.¹⁴² Akhirnya, kabinet pun terbentuk tanpa PNI.¹⁴³ Hal inilah yang mendorong PNI bergabung dengan PKI dan Partai Murba menjadi oposisi dari pemerintahan. Hal ini yang menunjukkan bahwa adanya sifat keberanian dari seorang Mohammad Natsir karena telah berani meninggalkan PNI. Kabinet yang disusun Natsir mengikutsertakan dari kalangan non partai maupun tokoh partai yang ahli pada bidangnya. Dalam komposisi Kabinet Natsir juga mendapat kecaman dari kalangan internalnya sendiri (Partai Masyumi), karena tidak memasukan PNI dalam kabinet, yang mana PNI merupakan partai terbesar kedua di parlemen.¹⁴⁴

Kecaman tersebut dilontarkan oleh Mr. Jusuf Wibisono, yang merupakan

¹⁴¹Dzulfikriddin, *Mohammkad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 70-71

¹⁴²*Ibid.*, hal. 70-71

¹⁴³Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004), hal. 41. Selanjutnya disebut *Politik Islam Anti Komunis*.

¹⁴⁴Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 72

Pejabat Ketua Masyumi.¹⁴⁵ Kritikannya tersebut mencangkup tiga hal :

“pertama, bahwa zaken kabinet kedudukannya pada masa ini, jauh lebih lemah daripada koalisi kabinet. Apalagi jika PNI tidak diajak serta kedalamnya. Padahal, PNI merupakan partai terbanyak kedua di parlemen. Kedua, bahwa menteri-menteri nonpartai dalam kabinet (Dr. Abdul Halim, Mr. Assaat, Hamengkubuwono dan Dr. Bahder Djohan) hanya lahirnya tidak berpartai, tetapi sebenarnya simpatinya sudah dapat diduga ke arah mana yang tertuju (maksudnya PSD). Ketiga, bahwa tiga menteri (Assaat, Halim dan Bahder Djohan) mempunyai pertalian darah yang erat. Walaupun mereka mempunyai integre, dalam masa penuh kritikan ini tentu saja satu sama lain akan saling melindungi. Maka kabinet ini adalah satu *'circle intime'*”.¹⁴⁶

Menurut penulis, kritikan tersebut menunjukkan, bahwa adanya sosok keberanian dalam diri Natsir dalam menentukan kebijakan terlepas itu mendapat kritikan dalam partainya sendiri. Namun, bagi Natsir kabinet yang ia bentuk tak pandang bulu, meskipun adanya hubungan pertalian darah maupun simpatisan tetapi Natsir mengutamakan kualitas dari ahli bidangnya masing-masing.

Kabinet Natsir tidak berumur lama. Hal yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dengan adanya Mosi Hadikusumo mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah tentang pembekuan DPRD dan mundurnya sejumlah menteri dari Partai Indonesia Raya, Abdul Halim dan Harsono Tjokroaminoto. Jatuhnya Kabinet Natsir disikapi oleh rival politiknya itu sendiri yakni PKI, dan menilai bahwa pemerintahan Natsir tidak didasarkan pada persatuan nasional yang merdeka dan demokratis. Natsir juga dianggap menghambakan diri kepada kepentingan imperialis, karena tidak mau membatalkan persetujuan KMB. Bagi PKI, satu-satunya untuk mengatasi persoalan

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 184-185

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 73

itu adalah perlu dibentuknya kabinet nasional yang bersifat koalisi.¹⁴⁷

Dalam pandangan Amerika, sikap yang Nasionalis yang dimiliki Natsir, yang sebelumnya demikian baik hubungannya dengan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mereka menilai, pemimpin Islam yang taat dan bersikeras tidak mau memenuhi selera Amerika. Kembalinya pemerintahan negara kesatuan yang terpusat di Jawa dibawah kepemimpinannya dianggap Amerika tidak cukup fleksibel untuk kelancaran pemerintahannya. Tindakan yang dilakukan Natsir ini pun disadarinya bahwa usia kabinetnya tidak akan lama lagi dan ditambah lagi sebelumnya partai-partai oposisi dalam parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya, dengan sukarela ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden dan Soekarno pun menunjukkan kembalinya kekuasaan Partai Masyumi dalam pemerintahan. Dr Sukiman diangkat menjadi Perdana Menteri.¹⁴⁸ Mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno tak lepas dari kesenjangan antara kabinet dan parlemen yang didominasi oleh pihak oposisi. Mereka yang datang ke gedung parlemen, tetapi tidak duduk di kursi yang tersedia. Mereka datang bergerombolan di luar gedung sambil memperolok anggota parlemen yang menduduki kursinya. Perbuatan tersebut menyebabkan sidang tidak qorum. Natsir menggambarkan pelanggaran mereka terhadap etika politik itu dengan “bagaikan main tenis tanpa net”.¹⁴⁹

Bagi penulis, saat Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama tak lepas dari prestasi beliau yang mempersatukan negara kesatuan dalam catatan mosi integral

¹⁴⁷Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis.*, hal. 45

¹⁴⁸Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soeharto.*, hal. 28

¹⁴⁹Dzulfikridin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah.*, hal. 91

Natsir. Jabatan tersebut merupakan sebagai bentuk penghargaan sekaligus sebuah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada Natsir atas konsep politiknya dalam pemersatu bangsa. Dalam aksi politiknya pun, sikap yang teguh dimilikinya tak membuat ia goyah untuk memperkaya diri meskipun ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Sosok sikap teguh inilah yang sangat jarang kita temui saat ini.

B. Mohammad Natsir Seorang Politisi

Dalam kiprah politik Natsir telah penulis bahas pada bab sebelumnya. Saat menerjuni bidang politik, Natsir adalah seorang politikus piawai. Begitu juga menerjuni medan “perang”, ia menjadi panglima yang gagah berani, dan saat berdebat dengan “musuh”, ia tampil sebagai pakar Ilmu dan dakwah. Kefahaman yang mendalam tentang sirah dan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat yang berjuang, berhijrah, dan berjihad menegakkan kebenaran dan keadilan Illahi. Berbekal kepintaran dan bakat semula jadi anugrah Allah SWT kepada Mohammad Natsir, di samping lingkungan keluarga dan budaya yang mendorong ke arah kecermelangan intelektual. Dalam tindakannya pun pada saat Orde Lama ia terjun ke dunia politik bukan hanya semata-mata untuk kekuasaan melainkan agar ajaran nilai-nilai etika dalam berpolitik tetap terjaga serta keterlibatannya dalam dunia perpolitik hanya untuk berdakwah.

1. M. Natsir dan Masyumi: Seorang “Pembangkok”

Eksistensi Natsir dalam Masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Bagi Natsir, pembentukan Masyumi adalah dalam

rangka menyalurkan aspirasi politik umat Islam sebagai cerminan dari potensi mereka yang sangat besar dan konkret. Menurut pengamatan pada masa konkrit itu, suatu massa konkrit tanpa pemimpin partai politik yang berasaskan Islam akan mudah jatuh ke tangan pihak-pihak yang sudah sejak semula menentang implimentasi syari'ah dalam kehidupan bernegara setelah kemerdekaan Indonesia. Maka pada kongres umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945 dibentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi.¹⁵⁰ Pada saat itu Natsir berperan sebagai ketua panitia,¹⁵¹ dan Sukiman terpilih menjadi ketuanya.¹⁵² Pada kongres tersebut diputuskan bahwa Masyumi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumi akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Maka, dengan begitu pula bahwa keberadaan partai Islam yang lain tidak di akui lagi.¹⁵³

Natsir memimpin Masyumi pada kurang lebih sepuluh tahun lamanya sejak 1949-1958. Berkaitan dengan peran politik Natsir saat itu, tidak bisa dinilai dari seberapa lamanya ia menjabat ketua umum, melainkan sejauh mana ia membawa keberhasilan Masyumi saat pemilu maupun pengaruh daripada kehadiran Masyumi itu sendiri. Dalam masa kepemimpinannya, sungguh pengaruh partai Masyumi sangat kuat dan banyak berbuat dalam memajukan cita-cita progresif untuk mewujudkan haluan-haluan politik partai. Kehadiran Masyumi pun mempunyai pengaruh yang sangat besar. Terbukti secara Nasional Masyumi menduduki urutan kedua. Meskipun

¹⁵⁰Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi Mohammad Natsir.*, hal 44

¹⁵¹Waluyo, *Dari "Pemberontak".*, hal. 67

¹⁵²Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal. 41

¹⁵³Firdaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup.*, hal. 157

Masyumi dikatakan sebagai *All Indonesian Party*, karena memenangkan perolehan suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil melaksanakan pemilu. Pemilu 1955 sungguh mengecewakan Masyumi. Harapannya untuk meraih suara mayoritas dengan dukungan umat Islam Indonesia, ternyata tidak bisa diwujudkan. Tetapi Masyumi mempunyai kesempatan di Konstituante untuk memperjuangkan Undang-Undang Dasar Islam lah yang bisa melenyapkan Komunisme di Indonesia.¹⁵⁴

Peranan Natsir dalam kiprah politiknya, pernah mengatakan untuk memperingatkan umat bahwa apabila berpindah dari Islam ke Pancasila adalah sama artinya dengan “melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampa, vacuum, dan tak berhawa”. Namun pernyataan tersebut disambut oleh Arnold Mononutu dengan pernyataan yang tidak kurang pedasnya: “dari ideologi Pancasila ke negara Indonesia berdasarkan Islam, bagi umat Kristen adalah ibarat melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia yang *volwaaardig*, ke ruang kosong, vacuum, dan tak berhawa”.¹⁵⁵

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa dalam kehidupan Natsir pun tak terlepas dari kontroversi. Namun ia menilai perbedaan adalah suatu keharusan. Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Jadi hal yang wajar bagi Natsir. Dalam menyikapi pluralisme, Natsir selalu menekankan untuk tetap bersikap positif dalam memandang adanya pluralisme di Indonesia. Menurutnya pluralisme sesuatu yang *given*, dan tidak bisa ditolak. Pluralisme tidak mungkin baginya akan

¹⁵⁴Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis.*, hal. 83

¹⁵⁵Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi. Mohammad Natsir.*, hal. 50

hilang. Dalam menyikapi suatu persoalan Natsir lebih konstitusionalis. Sehingga Natsir terlihat cair, dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan dengan kelompok yang bukan muslim.

Perjuangan panjang Natsir tidak banyak berjalan mulus tanpa halangan, tetapi seringkali ia harus dihadapkan pada berbagai permasalahan sulit. Sumbangsihnya terhadap negara Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari jasa-jasanya terhadap bangsa hingga dimusuhi oleh pemerintah karena pemikiran dan tindakannya yang dianggap “pembangkang”. Berbicara tentang mengenai pergerakan Islam di zaman modern, tokoh pemikiran Islam yang juga memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan Islam dunia adalah satu-satunya Natsir bersama partai Masyumi dengan satu tujuan yakni untuk membentuk masyarakat Islam dengan berpedoman kepada wahyu Allah.¹⁵⁶

Doktrinisasi Masyumi dalam konsepnya merujuk pada Al-Qur'an yang memerintahkan agar umat Islam bersatu dan jangan terpecah belah. Perbedaan pendapat antara sesama kelompok Islam harus dilihat sebagai rahmat dari Tuhan, karena perbedaan itu tidak bersifat fundamental tetapi hanya berhubungan dengan masalah-masalah furu'iyah. Konsep pluralisme pun menjadi motif tersendiri yang jelas mendapat dorongan dari pandangan-pandangan dasar modernisme yang positif dan optimis memandang pluralisme.¹⁵⁷ Oleh karena itu, konsep pluralisme itu akan

¹⁵⁶Natsir, *Pak Natsir 80 Tahun.*, hal. 138-139

¹⁵⁷Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999). hal. 65. Selanjutnya disebut *Modernisme dan Fundamentalisme*.

membawa kepada sesuatu hal yang lebih baik.

Dalam prakteknya, dalam perjalanan Masyumi pun menghargai perbedaan tersebut dan menerima Pancasila sebagai landasan ideologi dasar negara bukan berarti serta merta diartikan sebagai bentuk persetujuan para pemimpin Masyumi terhadap tesis-tesis kaum nasionalis. Penggunaan Pancasila tersebut sebagai alat kepentingan Masyumi tidak terbatas dengan menyebutnya sebagai warisan budaya nasional. Ia pun mengajukan sebuah tafsiran baru Pancasila dari sudut pandang ajaran Islam.¹⁵⁸ Natsir menekankan keterikatan partainya pada Pancasila mengatakan:

“Dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan a priori sebagai satu “barang asing” yang berlawanan. Ia melihat di dalamnya satu *afspiegeling* (pencerminan) dari sebagian yang ada pada sisinya. Tapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Sepanjang Pancasila mengandung tujuan-tujuan Agama Islam, kita kaum muslim dengan ikhlas, dan tidak mau ketinggalan untuk menciptakan kebajikan itu. Di atas tanah dan dalam iklim Islam, Pancasila akan hidup subur. Mudah-mudahan Pancasila itu dalam perjalannannya mencari isi semenjak ia dilantarkan sebagai perumusan lima cita kebajikan, kira-kira 9 tahun yang lalu itu, tidak hendaknya diisi ditengah jalan yang hal-hal menentang ajaran Al-qur’an.¹⁵⁹

Keputusan tersebut diambil berdasarkan pada dua pertimbangan oleh Masyumi yakni, pertama, bukan karena mereka tidak setuju atau tidak ingin berkompromi dengan Pancasila. Tetapi mereka ingin terlebih dahulu mendengarkan partai-partai pendukung Pancasila untuk mengemukakan argumen-argumen mereka tentang keunggulan Pancasila sebagai dasar negara. Disisi lain juga Masyumi pun ingin membentangkan argumen-argumen mereka tentang keunggulan Islam sebagai

¹⁵⁸Remy Madinier, *Partai Masjumi*, hal. 307-308

¹⁵⁹“Apakah Pancasila bertentangan dengan Al-qur’an?”. Lihat di M Natsir, *Agama dan Negara*, hal. 158-163. lihat juga di Remy Madinier, hal. 309

dasar negara. Dalam prakteknya, perdebatan ini menunjukkan sikap kompromistis yang harus dilandasi sikap kejujuran dan keterbukaan. Maka dengan cara demikian, masing-masing pihak bisa mencari titik-titik persamaan untuk dijadikan dasar dari kompromi tersebut. Kedua, tokoh-tokoh Masyumi ingin memenuhi janjinya kepada anggota dan para pendukungnya dalam pemilihan umum 1955, karena sebagian tokoh-tokoh Masyumi telah berjanji untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.¹⁶⁰

2. M. Natsir di Majelis Konstituante: Sebagai Dakwah Perjuangan

Lembaga Konstituante sebagai hasil pemilihan umum tanggal 15 Desember 1955 dan dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956.¹⁶¹ Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa, Konstituante merupakan wadah satu-satunya badan yang berwenang menyusun Undang-Undang Dasar.

Dalam konsep politik pada pemikiran Natsir yang bertindak sebagai representasi umat Islam memandang Konstituante sebagai forum perjuangan untuk merealisasikan cita-cita umat Islam serta sebagai forum dakwah perjuangan untuk menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁶² Sosok kepribadian yang dengan gigihnya bahwa pengganti UUDS hanya bisa dipenuhi apabila mendapat kesempatan

¹⁶⁰Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hal. 207-208

¹⁶¹Tanggal 10 November 1956 disebutkan sebagai peristiwa dilaksanakan pelantikan majelis konstituante dalam bukunya Waluyo, *Dari Pemberontakan Menjadi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: Ombak, 2009). hal. 113. Sementara itu, berbeda dengan apa yang disebutkan juga pada tanggal 10 November 1956 adalah terjadinya sidang pertama majelis konstituante disebutkan dalam bukunya Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 17. Dapat disimpulkan bagi penulis berkeyakinan bahwa pada tanggal 10 November 1956, telah terjadinya dua peristiwa sekaligus, yakni, pelantikan sekaligus mengadakan sidang majelis Konstituante yang pertama kalinya. Ternyata kesimpulan penulis ini dikuatkan dalam sebuah sumber, lihat. A.W Widjaja, *Dekrit Presiden.*, hal. 27

¹⁶²Waluyo, *Dari "Pemberontakan"*, hal. 113-114

yang seluas-luasnya untuk menjelajah, membahas dan membandingkan pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan tegasnya Natsir mengatakan melakukan orientasi yang sungguh-sungguh agar hasil yang dicapai itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat dan akan datang.¹⁶³

Begitu juga dalam prakteknya, perdebatan yang terjadi di dalam Konstituante pada tahun 1955-1956 merupakan suatu refleksi persaingan dan perbenturan antara kedua sub-budaya politik. Pada waktu itu menyusun suatu undang-undang dasar untuk menggantikan UUDS 1950. Dalam polemiknya pun partai-partai Islam tanpa terkecuali bersepakat bahwa negara harus berdasarkan Islam. Sedangkan partai lainnya menginginkan negara harus berdasarkan nilai-nilai nasionalis atau Pancasila.¹⁶⁴ Konstituante pun mengalami perdebatan yang sangat sengit bahkan berubah fungsi menjadi “medan pertarungan” antara nasionalis muslim dan nasionalis sekuler karena perdebatan tersebut telah menyentuh pada aspek ideologis kehidupan politik. Pada tanggal 10 November 1956 juga Konstituante membuka sidang pertamanya. Perdebatan pun berlangsung terbuka, bebas dan penuh kontroversi. Natsir menolak Pancasila dianggapnya sekulerisme (*ladieniyah*) karena tidak mengakui wahyu Ilahi sebagai sumber. Natsir menyatakan bahwa Islam mencakup keseluruhan suatu kebudayaan yang lengkap termasuk juga Pancasila di dalamnya. Meskipun terdapat substansi yang berkaitan dengan Tuhan, namun bagi Natsir, Pancasila sebagai dasar

¹⁶³Konstituante RI, *tentang Dasar Negara RI dalam Konstituante*, (Bandung, 1958).Lihat di Waluyo, *Pahlawan Nasional.*, hal. 120

¹⁶⁴Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Grafii, 1991), hal. 42

negara tetap saja mengandung interpretasi-interpretasi kabur dan dibuat-buat. Natsir meletakkan Pancasila sebagai konsep yang murni dan terus netral tanpa warna.¹⁶⁵

Natsir juga berpendapat adanya alasan historis sosiologis mengapa ia tetap bersiteguh terhadap pendiriannya yang menginginkan Islam sebagai dasar negara karena mayoritas penduduk Indonesia beragamakan Islam. Jadi dalam pemikirannya negara berlandaskan Islam karena adanya penduduk Islam, hal ini juga dikuatkan dengan kenyataan sejarah, sejak pertama kali ke Indonesia, Islam menjadi salah satu sumber kekuatan politik di Nusantara. Sebagai bentuk bukti banyaknya kerajaan Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal inilah yang menjadi alasan yang kuat dijadikan Natsir sebagai dasar menjadikan Islam sebagai dasar negara.¹⁶⁶

Dalam sidang itu Mohammad Natsir mengatakan :

Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam, bukan sebagai "*pure concepts*" yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.¹⁶⁷

Dari pernyataannya di atas, bahwa dapat disimpulkan dalam pandangan penulis, bahwa Mohammad Natsir menilai Pancasila merupakan suatu kesepakatan maupun buatan manusia yang tentunya memiliki makna ideologi yang kabur sehingga menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan. Pancasila tidak akan

¹⁶⁵Waluyo, *Dari "Pemberontak"*, hal. 122

¹⁶⁶Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hal. 90

¹⁶⁷Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 171-172

berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang telah jelas sudah memiliki pandangan hidup yang jelas, tegas, terang dan lengkap. Sedangkan konsep Islam yang diusulkannya sebagai dasar negara berpandangan bahwa Islam merupakan suatu kebudayaan yang lengkap dan mempunyai nilai-nilai sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin keragaman hidup antarberbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.

Sementara itu, menurut Achmad Dasuki Siradj, alasan PKI di konstituante menolak Islam sebagai dasar negara adalah bukan karena partainya anti agama sebagaimana dituduhkan oleh para pemakai agama sebagai topeng menuduhnya, melainkan praktek yang dijalankan oleh pembela Islam dari Masyumi jelas-jelas merugikan negara dan rakyat. Ia mencontohkan sikap Masyumi yang tidak tegas terhadap gerombolan pengacau DI/TII di Jawa Barat maupun di Aceh. Menurutnya, usulan agar Masyumi memberikan pengampunan umum dianggap sebagai bukti hipokrisi Masyumi, yaitu bertentangan antara apa yang selalu dijadikan argumentasi menghadapi kelompok komunis.¹⁶⁸

Namun, Natsir melalui partainya (Masyumi) menegaskan pemisah dengan pemberontak (Darul Islam) dengan berulang-ulang demi menghilangkan sebuah kerancuan, yang pada intinya yaitu:

“Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Dewan Pimpinan Partai menganggap perlu untuk mengumumkan penjelasan yang tegas tentang perbedaan pendirian politik antara Masyumi dan Gerakan Darul Islam. Agar Masyumi mencapai maksudnya melalui jalan demokratis parlementer sesuai dengan amanat UUD. Maka dengan begitu, ia (Masyumi) berharap agar lebih

¹⁶⁸Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*, hal 90

bertambah jelas perbedaan antara pendirian Masyumi dan Gerakan Darul Islam.”¹⁶⁹

Menurut penulis juga, bahwa pihak lawan politik menilai adanya inkonsisten yang terjadi dalam tubuh Masyumi terhadap menyikapi suatu persoalan. Terlepas dari hal tersebut, adalah suatu hal yang wajar terdapat kontroversi dalam situasi politik saat itu. Bagaimana dalam setiap kegiatan politik tentu adanya sikap untuk mempengaruhi, meyakini orang lain agar bisa diajak bekerjasama dengan tujuan yang sama pula. Namun ia meyakini “lawan” politiknya agar hilang sebuah kerancuan demi mempertegas perbedaan diantara keduanya melalui konstitusional.

Dalam sidang konstituante pun juga membahas tentang konsep demokrasi. Mengenai hubungan demokrasi dengan umat Islam Natsir pernah mengatakan: “... *sejauh menyangkut ummat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab dalam Islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis*”. Dalam menangani dan mengatur masalah-masalah sosio-politik umat, di antara prinsip-prinsip demokrasi yang penting harus diikuti dan dihormati. Menurut konsepnya hal yang terpenting tersebut adalah *syura* (musyawarah). Tentang bagaimana mekanismenya tergantung ijtihad umat Islam, karena Islam tidak menetapkan secara kaku dan pasti.¹⁷⁰

Dalam prakteknya, waktu kurang lebih 2,5 tahun melakukan sidang-sidangnya, Konstituante pun mengalami jalan buntu dan tidak menghasilkan Undang-Undang Dasar yang diinginkan. Seandainya Majelis ini diberi kesempatan yang fair dalam masa hanya beberapa bulan lagi, tanpa intervensi dari luar, niscaya Majelis ini

¹⁶⁹Remy Medinier, *Partai Masjumi*, hal. 157-158

¹⁷⁰Waluyo, *Dari “Pemberontak”*., hal. 126

dapat melaksanakan tugasnya dan berhasil menyelesaikan problem-problemmnya dengan tuntas, serta merampungkan tugasnya yang mulia yang dipercayakan segenap rakyat Indonesia pada pundaknya untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang permanen yang bisa diterima dengan bulat setulus hati serta didukung dan dijunjung segenap kelompok yang hidup dalam masyarakat.¹⁷¹ Menurut George Mc. Turnan Kahin, seorang ilmuwan barat yang ahli dan menaruh minat amat besar pada masalah pergerakan di Indonesia mengatakan :

“Mengenai peranan Natsir dalam pekerjaan Konstituante, nampaknya bagi saya ia telah menyelesaikan daripada apa yang ada pada umumnya telah diakui. Di tengah-tengah adanya satu kecurigaan keras pada mulanya oleh partai-partai non-Islam, maka Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Osman Raliby dan pemimpin-pemimpin progres Masyumi lainnya pada akhirnya telah bergerak jauh dalam menyesuaikan kedudukan partai mereka dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam perwakilan politik di Konstituante. Menjelang akhir kelihatannya seolah-olah telah cukup diketemukan tempat pijak bersama untuk mengadakan suatu dasar yang cukup baik untuk kompromi-kompromi terakhir yang seyogyanya dapat menghasilkan satu Undang-Undang Dasar yang cocok dengan keadaan sosial dan politik di Indonesia. Walaupun Soekarno tidak mengakhiri kehidupan Konstituante itu dengan begitu kasar, saya yakin dan percaya bahwa sesungguhnya ada satu kesempatan baik dan wajar untuk mencapai suatu persetujuan yang diperlukan itu diantara duapertiga dari pada anggotanya”.¹⁷²

Dalam perdebatan yang cukup sengit itu, hal yang sangat mendasar adalah mengenai dasar negara tidak berhasil diatasi. Perbedaan prinsip itu berkenaan dengan adanya pihak yang menginginkan ditetapkannya UUD 1945 tanpa adanya perubahan apa-apa, dan ada pihak yang menghendaki perubahan alenia keempat dan hubungannya dengan pasal 29 UUD 1945. Sidang-sidang Konstituante tidak berjalan,

¹⁷¹Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsesus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – 1959* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 99. Selanjutnya disebut *Piagam Jakarta*.

¹⁷²*Ibid.*, hal. 100

mengalami reses sehingga pertentangan timbul dan berlarut-larut. Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante meskipun revolusinya belum selesai dan memberlakukan UUD 1945. Hasil pemilihan umum 1955 pun dibubarkan dan digantikan dengan DPR-GR yang anggotanya diangkat Presiden. Partai Masyumi dan PSI pun yang bersikeras menentang kebijakan Presiden pun di bubarkan. Demokrasi parlementer tergeser oleh demokrasi terpimpin. Dalam hal ini Natsir, M. Hatta dan Sjahrir yang tidak setuju dan menolak demokrasi terpimpin semakin tidak dapat bersuara bahkan masuk kedalam tahanan.¹⁷³ Adapun isi pokok Dekrit Presiden yaitu :

- b. Pembubaran Konstituante
- c. Berlaku kembali UUD 1945
- d. Tidak berlaku kembali UUDS 1950 dan
- e. Pembentukan MPRS dan DPAS¹⁷⁴

Dalam hal ini, Natsir mempersalahkan kekurangan idealisme, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta tidak adanya realisme dalam menanggapi masalah-masalah aktual maupun jawaban yang mungkin.¹⁷⁵ Natsir juga menegaskan bahwa demokrasi harus tetap dijalankan. Ia menilai bahwa hancurnya sebuah demokrasi di Indonesia, itu berarti akhir negara

¹⁷³Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 17-18. Selanjutnya disebut *Mencari Sosok Demokrasi*.

¹⁷⁴A.W. Widjaja, *Dekrit Presiden.*, hal 4

¹⁷⁵Dalam Feith/ Castle, 1988, hal. 79. Dalam di Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi.*, hal. 18

Indonesia.¹⁷⁶ Maka dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Masyumi pun tunduk kepada undang-undang dasar yang berlaku. Oleh karenanya, merasa berhak menuntut kepada siapa pun, juga sampai kepada pemerintah dan presiden untuk tunduk pula kepada undang-undang dasar sebagai landasan bersama hidup.¹⁷⁷

3. M. Natsir dalam PRRI: Sebuah Gerakan “Separatisme”

Siang itu, tepatnya tanggal 15 Februari 1958 mereka memproklamasikan PRRI, dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. PRRI disokong oleh komandan-komandan tentara setempat. Tak diragukan lagi bahwa mereka yang turun hijrah ke Bukit Tinggi, tokoh-tokoh politik yang berpengalaman dan anggota-anggota tentara yang pemberani ialah para patriot. Saat itu, Presiden Soekarno sedang berada di Tokyo, sedangkan Perdana Menteri Djuanda dan para kabinet lainnya berada di Jakarta.¹⁷⁸ Sebagaimana dimukakan di atas bahwa pembubaran Partai Masyumi tak terlepas dari keterlibatan pemimpin dan anggotanya, seperti Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap dalam “pemberontak” memuncak dengan terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI, yang dinilai Pemerintahan Orde Lama sebagai Pemerintahan tandingan. Alasan terbentuk PRRI, mereka berpendapat bahwa pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda adalah pemerintahan yang tidak sah karena dalam pembentukannya menyimpang dari aturan-aturan konstitusi yang berlaku. Merekapun beranggapan hingga menuduh pemerintahan pusat terlaru toleran

¹⁷⁶*Ibid.*, hal 19

¹⁷⁷Endang Saifuddin Anshari, *Piagamk Jakarta.*, hal. 129

¹⁷⁸Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soeharto.*, hal. 105-106

dengan komunis, memfokuskan pembangunan hanya di pulau Jawa dan mengabaikan pulau-pulau lain di luar Indonesia. PRRI yang pada akhirnya dilumpuhkan secara militer oleh pemerintahan pusat hingga terpecah belah dan PRRI pun yang kemudian berganti nama dengan Republik Persatuan Indonesia atau RPI, hingga pada akhirnya menghentikan perlawanan setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah pusat kepada mereka yang menyerah.¹⁷⁹

Hal ini disebabkan kekecewaan Natsir oleh kekusaran pemerintahan Soekarno yang dinilai makin dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan kecendrungan kepemimpinan nasional yang semakin otoriter. Sehingga mengakibatkan ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan serta tanpa ada alasan yang jelas oleh Pemerintah Orde Lama. Masyumi dan PKI, adalah dua yang tidak mungkin bertemu bagaikan air dan minyak. Pemerintah Pusat dalam hal ini menanggapinya bahwa Proklamasi PRRI merupakan tindakan yang keliru arah. Tindakan itu tidak akan mendapatkan dukungan rakyat dan akan larut dengan sendirinya dalam waktu yang relatif singkat. Proklamasi PRRI tidaklah menjadi sebuah ketakutan semata bagi pemerintah melainkan berita tentang “pembemberotakan” PRRI sebagai berita utama dunia tanpa adanya tanggapan dari Pemerintahan Pusat.¹⁸⁰ Sikap yang ditunjukkan Natsir ketika persekutuan politik antara Masyumi dan PSI pimpinan Syahrir, dengan maksud untuk memotong hubungan dengan Soekarno dan pemerintahannya terbukti tidak berjalan. Persekutuan

¹⁷⁹Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.*, hal. 52

¹⁸⁰Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Soeharto.*, hal. 2

keduanya pun mengalami tanggungjawab yang pincang dalam menggerakkan pemberontakan. Masyumi yang mempertaruhkan segala-galanya dan telah kehilangan segala-galanya pula ditengah-tengah hutan Sumatera Barat. Sebaliknya PSI tidak seorangpun ditampilkan untuk dilibatkan dalam hutan Sumatera, ataupun hutan Sulawesi Utara, bahkan membiarkan dalang-dalangnya tinggal di luar negeri tanpa adanya bantuan yang berarti bagi jalannya pemberontakan. Abdullah Nazir seorang wartawan Masyumi mengatakan :

“kalau pemimpin-pemimpin Masyumi seperti M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara tekun dengan sembayang lima waktu sehari semalam, memohon do’a kepada Tuhan agar membantu perjuangan mereka ditengah-tengah hutan di sekitar Bukit Tinggi. Sedangkan pemimpin-pemimpin PSI enak-enak bersantai di meja judi di Jenewa, Roma, Monte Carlo dan Beirut”.¹⁸¹

Dalam konsep politik Natsir nilai-nilai rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia adalah hal yang paling utama. Sementara itu, dalam prakteknya pun tak sedikitpun dalam dirinya timbul sifat yang cenderung hedonis bahkan apatis. Kepribadian yang sederhana dan peduli itulah yang ditonjolkannya. Karena baginya jabatan yang pernah ia pegang bukanlah merupakan alat untuk mendapatkan kekuasaan melainkan suatu amanah tanggungjawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat bahkan Tuhan.

Menurut Roso Daras mengutip dalam bukunya para pelaku PRRI/Permesta memperoleh pengampunan dari pemerintahan Soekarno, meski sekalipun mereka terlibat didalamnya telah melakukan tindakan makar dengan memberontak dan membentuk pemerintahan tandingan di Padang. Mereka dinilai sebagai bagian dari

¹⁸¹*Ibid.*, hal. 108

konspirasi asing yang tidak nyaman dengan kepemimpinan Soekarno. Namun disisi lain diketahui bahwa kelompok pemberontakan ini dalam aksinya berkat bantuan dari Amerika Serikat. Bantuan ini tidak hanya sebatas Dolar, tetapi juga persenjataan modern, pesawat terbang, kapal laut dan alat-alat komunikasi modern.¹⁸²

Di sisi lain bahwa dalam pemberontakan PRRI/ Permesta tak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat saat itu. Sehingga mereka yang terlibat didalamnya tanpa sadar telah dimanfaatkan oleh pihak asing. Dan hal ini pun diakui oleh Ahmad Husen sang proklamator PRRI setelah mendapatkan ampunan dari Soekarno ia menangis dan berterimakasih atas ampunannya. Begitu juga dalam pengakuannya Zulkifli Lubis yang dikenal dengan bapak intelijen Indonesia yang juga pernah terlibat dalam PRRI, setelah mendapatkan ampunan mengatakan tak ada sedikitpun rasa dendam dalam hatinya. Ampunan juga diberikan kepada Syafruddin Prawiranegara dan termasuk Natsir, semuanya direhabilitasi.¹⁸³

Menurut Prof. George McT. Kahin, mengatakan justru telah mengurangi gejala emosional para militer yang terlibat di dalam pergolakan di daerah. Secara terang Kahin yang ahli masalah ke-Indonesia-an, memberikan catatan untuk pak Natsir tatkala itu mensyukuri atas 70 tahun usia tokoh yang dihormati itu sebagai berikut :

“agakny telah nampak bagi saya bahwa satu dari sumbangan-sumbangan utama Natsir kepada tanah airnya datang selama masa berjalannya pemberontakan PRRI. Karena peristiwa ini terjadi telah menjadi sasaran dari

¹⁸²Roso Daras, *Total Bung Karno Serpihan Sejarah yang Tercecer*, (Depok : Imania, 2013). hal. 358. Selanjutnya disebut *Total Bung Karno*.

¹⁸³*Ibid.*, hal. 359-361

pandangan-pandangan yang begitu berbeda-beda di Indonesia dan sedemikian banyak pula ketidaktahuan di luar negeri, maka peranannya didalamnya memerlukan penelitian cermat yang lebih dekat daripada biasanya telah dilakukan. Penilaian saya sendiri mencerminkan satu studi yang panjang dari peristiwa tersebut dan terbukannya jalan baru-baru ini dalam memperoleh bahan-bahan keterangan yang belum pernah dapat diperoleh pengarang-pengarang lainnya. Atas dasar ini maka sangat jelaslah sudah, bahwa Natsir haruslah dihargai karena telah memberikan satu sumbangan penting kepada pemeliharaan teritorial dari Indonesia. Dengan disokong Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanuddin Harahap, ia telah melakukan satu perjuangan yang pada akhirnya berhasil di kalangan dalam PRRI untuk menghalang-halangi para mereka yang lebih menyukai Sumatera dari Indonesia dan menjadi satu negara tersendiri. Ia bersikeras terhadap jalan tempuhan seperti itu walaupun dengan berbuat demikian berarti mengorbankan sokongan pihak luar yang amat berkuasa dan sangat potensial. Maka untuk sebegini besar karena Natsir lah maka perjuangan PRRI itu telah dilakukan dalam batas-batas ikatan persatuan Indonesia.”¹⁸⁴

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Natsir tetap menginginkan konflik ini adalah

konflik internal bangsa dan negara kita bersatu. Oleh karena itu, PRRI haruslah dilihat sebagai konflik internal antar sesama bangsa kita sendiri, antara mereka yang menganggap pemerintah pusat sah dan tidak sah. Konflik antar daerah dengan pusat yang memerlukan penyelesaian yang bijaksana. Karena itu, sungguh keliru menganggap PRRI sebagai gerakan separatis.¹⁸⁵

C. Relevansi Etika Politik Mohammad Natsir

Relevansinya dalam penelitian ini, Penulis terbatas akan membahas semua aspek moral dan perilaku Natsir dari semua pertanggungjawaban para kebijakan pemimpin. Sosok yang santun, sederhana, konsisten, yang lebih mementikan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadinya sungguh sangat jarang kita

¹⁸⁴M Natsir, *Pak Natsir 80 Tahun.*, hal. 166

¹⁸⁵<http://yusril.ihzamahendra.com/2008/07/03/mengenang-seratus-tahun-mohammad-natsir/>
di akses pada 18 Februari 2017 pukul 10.09 WIB

temukan pada kondisi saat ini. Indonesia adalah negara yang majemuk, tentu didalamnya terdapat banyak perbedaan baik, suku, agama, ras, dan atnis. Tanggungjawab seorang pemimpin yang menjadi panutan publik sangat dibutuhkan. Diawali bagaimana seorang pemimpin harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat diatas problematika yang ada pada suatu masyarakat tersebut dan bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik. Hal ini yang harus diperhatikan etika politik seorang pejabat negara. Ketika pada saat polemik di perlemen yang cukup tegang saat pemerintahan Terpimpin, namun ia tetaplah mengeluarkan kata-kata yang baik dan tak pernah kasar. Begitu juga pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan totaliter, dengan pembangunan nasional yang bersifat kapitalis, masif dan ekshaustif, tentu saja isu-isu moral amat relevan dipertanyakan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), kejahatan-kejahatan politik terhadap Islam politik dan kaum muslimin selama lebih dari dua dekade 1970-1990. Kejahatan-kejahatan tersebut diantaranya pembantaian umat Islam di Tanjung Periok, Lampung, Aceh, pelarangan pelajar mengenakan busana muslimah atau jilbab, pelarangan libur sekolah di bulan Ramadhan, RUU perkawinan yang bertentangan dengan syari'at Islam, masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN tahun 1978 dan kebijakan fusi partai-partai politik Islam ke satu wadah tunggal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan lain-lain.¹⁸⁶ Dalam tatanan pemerintahan seperti pengurusan sumberdaya alam tanpa terkendali, kesenjangan sosial-ekonomi dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) adalah beberapa

¹⁸⁶Ahmad Suhemi, *Polemik Negara Islam.*, hal. 164

warisan utama para pemimpin pembangun ini, yang akibat-akibat negatifnya masih dapat dirasakan sampai sekarang ini. Fakta bahwa Presiden Soeharto bulan Mei 1998 dipaksa mengundurkan diri, terutama, oleh kekuatan mahasiswa serta hujan menyakitkan yang kemudian diterimanya cukup menjelaskan bahwa Presiden Soeharto beserta rezim Orde Baru-nya sudah kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.

Era Reformasi sudah berlangsung selama delapan belas tahun dan bahkan sudah mengalami empat masa pemerintahan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjalani masa pemerintahan terlama, berlangsung sejak tahun 2004. Meskipun berhasil menjalani dua periode pemerintahannya, dengan program-program pembangunan yang relatif stabil dan berkesinambungan, tidak berarti para pemimpin di masa pemerintahan Presiden SBY ini tidak bisa dipertanyakan secara moral. Hal yang paling menyolok adalah praktek korupsi oleh para pemimpin di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, baik di pusat mau pun di daerah. Melakukan korupsi berarti mencuri uang negara yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat dan akan mengekalkan ketidakadilan dalam masyarakat menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban moral para pemimpin pembangun di era Reformasi sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan.

Hal ini sebagaimana telah kita ketahui pernah dikampanyekan oleh Nurcholish Madjid atau akrab dipanggil Cak Nur, beliau menyatakan tidak anti-Islam sebagai agama, tapi anti politisasi Islam. Ia menolak keras politisasi Islam yang berkepentingan kelompok ideologis politik yang tergabung dalam partai-partai Islam.

Terkenal dengan semboyannya ketika saat itu sepanjang dekade 1970-an mengatakan: “*Islam Yes, Partai Islam No*”. Dalam pandangannya juga kekuatan politik Islam tidaklah selalu identik dengan partaipartai Islam apalagi partai itu tersangkut korupsi, koncoisme, nepotisme bahkan konflik elit didalamnya yang tak kunjung selesai.¹⁸⁷ Namun disisi lain Cak Nur mempunyai kesamaan yakni ia menolak Indonesia dijadikan Negara Islam karena negara pancasila telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik Islam. Tetapi disisi lain Cak Nur dikenal sebagai tokoh cendikiawan muslim muda pewaris tradisi intelektual Natsir. Itu sebab Cak Nur dijuluki “Natsir Muda”.¹⁸⁸ Sejauh ini, sepengetahuan penulis, belum ada pelaku politik saat ini yang mewarisi sifat sederhana, integritas, santun, komitmen, intelektual, politisi juga seorang ulama’. Bahkan ketika Indonesia mencari jatidiri polemik di Majelis Konstituante tahun 1950-an mencari dasar negara apakah negara Indonesia berdasarkan Syari’at Islam atau Pancasila antara nasionalis muslim dan nasionalis sekuler. Perdebatannyapun sangat cerdas cukup alot, bahkan tidak menemukan hasil titik temu sehingga Soekarno pun membubarkan Majelis Konstituante tersebut karena tak kunjung selesai. Terlepas perdebatan yang sangat sengit, dalam pribadi Natsir tak sedikitpun memiliki rasa dendam, hingga keluar kata-kata kasar dari mulutnya. Ia mampu membedakan urusan negara dan pribadinya. Ia tetap membangun silaturahmi kepada semua orang yang pro maupun kontra. Baginya ideologi merupakan harga mati untuk dipertahankan yang telah digariskan Al-Qur’an

¹⁸⁷*Ibid.*, hal. 165

¹⁸⁸Ahmad Wahid, *Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Ahmad Wahid*, Karya Disunting Djohan Effendi,(Jakarta : LP3ES, 1981). Lihat juga di Ahmad Suhelmi, *Ibid*, hal. 167

dan Hadist. Ketika menjabatpun ia tak pernah menggunakan pakaian yang layaknya seorang pejabat negara. Baginya jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan bukan sebagai alat untuk mencari kekuasaan hingga memperkayakan diri. Sikap idealisme yang teguh inilah yang membuat keperibadian Natsir disegani kawan maupun lawan politik dimasanya.

Perbandingan partai-partai Islam maupun aktor-aktor pejuang Islam politik dahulu dan saat ini sungguh jauh dari idealisme, intelektual. Tak jarang mereka politisi Islam saat ini menggunakan lebel Islam dalam kepentingan politiknya serta tak jarang juga para aktor politik Islam yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan pribadi maupun teman-teman seideologinya. Ditambah lagi desakan-desakan politik dari dalam maupun luar sistem sehingga membuat para politisi muslim maupun non muslim tidak mampu dikendalikannya. Problematika yang di alami setiap negara mempunyai tantangannya tersendiri. Para elit politik saat ini terlalu sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan yang tak jelas hingga menguras energi habis waktu yang sumbernya dari kegaduhan dari pemberitaan itu sendiri. Makin banyak koalisi yang dibangun para pejabat elit politik akan menimbulkan bagi-bagi kursi sebagai bentuk balas budi mulai dari kendaraan politiknya, donatur, relawan dan lain-lain. Kegaduhan-kegaduhan tersebut diakibatkan ketidakpahaman dalam menyelenggarakan negara. Sungguh sangat penting bagi para elit politik saat ini mempelajari hakikat bernegara dan bagaimana mekanismenya. Jadi penjiwaan, pendalam hal-hal seperti itu sangatlah penting tentunya harus ada kombinasi. Jika kita tidak memahami bernegara, bahkan tidak punya pengalaman dalam

menyelenggarakan bernegara maka dengan demikian negara hanya dijadikan sebagai alat tirani sehingga menimbulkan kekacauan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam pandangannya menelaah dengan tekun perdebatan yang cukup keras tentang “dasar negara” di Majelis Konstituante RI antara tokoh-tokoh Masyumi, PNI, PKI, PSI dan tokoh-tokoh lainnya. Semua polemik dan perdebatan itu, pada umumnya dilakukan dengan sportif, argumentatif, menggunakan bahasa yang baik, dan tidak pernah menyerang pribadi seseorang, yang tidak ada relevansinya dengan topik perdebatan.¹⁸⁹

Penulis berpendapat, kalau begini terus, kompetisi-kompetisi memang baik pada dasarnya jika lebih mengutamakan rasional, argumentatif dan intelektual, tetapi tetap ideologi bangsa harus ada dalam jiwa seorang elit politik. Jadi, dengan demikian, Indonesia lebih cerdas dalam memecahkan suatu persoalan bangsa dan tentunya tak luput dari sejarah pendiri bangsa. Penting bagi kita hingga saat ini tentunya masih membutuhkan akan sosok kepribadian atas seorang pejabat saat ini seperti Mohammad Natsir, bahkan dengan integritas pribadinya telah memberikan teladan etika politik yang sangat berharga bagi generasi muda. Semoga kita bisa memposisikan diri sebagai Natsir muda yang akan datang.

¹⁸⁹ <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/11/08/ucapan-terima-kasih-2/> diakses pada 15 Februari 2017. Pukul 21.56 WIB

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mendeskripsikan dan menganalisis etika politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik Mohammad Natsir, maka pada tahapan ini penulis mencoba untuk memberikan sebuah kesimpulan akhir dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagi Mohammad Natsir, bahwa keterlibatannya dalam panggung politik merupakan perjuangan dakwah yang harus benar-benar diperjuangkan demi kepentingan orang banyak sehingga nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan. Meskipun Mohammad Natsir tidak menjelaskan secara rinci etika politik. Namun Mohammad Natsir menunjukkan dasar etika politik Islam kedalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada Al-qur'an dan Sunnahtullah. Berpolitik baginya sebuah dakwah untuk membumikan nilai-nilai Islam agar konsep *amar ma'ruf* secara kolektif harus disampaikan dan negara wajib mendidik atau memperbaiki pandangan hidup masyarakat. Begitu juga yang melatar belakangi pemikirannya itu semua tak terlepas dari faktor pendidikan dan faktor keluarga serta lingkungannya. Pemikiran Mohammad Natsir ditempa dan dididik dalam lingkungan yang religius sejak usia dini, maka hal yang sangat wajar jika dirinya sebagai tokoh pembaharu Islam dizamannya. Meskipun ia tak pernah menempuh pendidikan pesantren, dalam arti ia hanya masuk di sekolah Belanda. Akan tetapi, ia banyak

berguru dengan tokoh-tokoh spiritual beliau sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Karena itu, pemikirannya banyak dipengaruhi seperti: Ahmad Hassan, Agus Salim, Ahmad Syurkati, Mohammad Abduh, Rasyid Ridha, Mohammad Ali, dan Syakib Arselan.

2. Dalam pemikiran Mohammad Natsir, upaya politiknya dalam mempersatukan antara agama (Islam) dan negara adalah melalui perjuangan legal konstitusional yang dilalui Mohammad Natsir untuk mewujudkan pemikirannya. Hal ini tampak ketika Mohammad Natsir terlibat langsung keanggotaannya sebagai partai politik Masyumi dan anggota konstituante. Sementara itu, dalam Islam juga telah mengajarkan bagaimana tentang konsep politik yang telah dipraktikkannya seperti mengutamakan amanah, musyawarah, perdamaian, pluralisme, menghargai, toleransi dan taat terhadap pemimpin. Begitu juga dalam pemikirannya yang ingin menyatukan antara agama dan negara. Namun, hal ini mendapat respon langsung dari Soekarno yang mengatakan agama dan negara harus dipisahkan, tetapi, Mohammad Natsir melakukan itu dengan cara pendekatan konstitusional, manusiawi dan intelektual. Sosok yang sederhana, negarawan, arif dan bijaksana dapat menangkap dari apa yang ada di libuk hati setiap insan, adalah Mohammad Natsir tetap pada pendiriannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa harus melakukan angkatan senjata dan ia tetap menangkai dan menentang siapapun yang ingin memisahkan agama dan negara.

3. Pemikiran dan tindakan Mohammad Natsir tentang etika politik Islam mempunyai relevansi yang sangat kuat dibandingkan dengan kondisi moral saat ini. Fenomena dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi seperti halnya jual beli jabatan/ kursi. Sehingga muncul sikap korup, suap, pungli dan lainnya. Sementara itu, Mohammad Natsir menunjukkan sifat kesederhanaan ketika saat menjabat di eksekutif yang jarang ditemukan pada politisi saat ini.

B. Saran

Penelitian studi ini tentunya memiliki segala keterbatasan, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari akan hal itu. Oleh karenanya, sumbangsih pemikiran yang membangun sungguh diperlukan demi sebuah kesempurnaan. Karena itu juga, penulis memberikan kesempatan lebih untuk diberikan saran dengan harapan bisa ikut andil dalam memberikan sumbangsih dalam studi etika politik.

Pertama, penulis menyakini apa yang pembaca pegang saat ini sangatlah dekat dengan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam arti, penulis hanya membatasi pada konsep pemikiran dan aksi politik Mohammad Natsir dalam sejarah panggung birokrasi dan politik. Maka dengan selesainya penelitian ini, tentu bukanlah berarti selesai atas segala-galanya. Dengan demikian, perlu untuk ditelusuri lebih jauh lagi tentang sosok Mohammad Natsir yang belum penulis kaji. Pada umumnya masyarakat luas dan kalangan akademisi khususnya.

Kedua, menjadi pejabat publik sangatlah tidaklah mudah, baik itu sebagai pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif hingga partai politik sekalipun. Begitu banyak godaan dan tantangan yang mesti dihadapi baik itu datangnya dari dalam maupun luar. Apapun polemik yang ada, mesti dijawab dengan sikap yang penuh dengan knowledge, integrity, dan attitude serta konstitusional.

4. *Ketiga*, bagaimanapun umat Islam dituntut untuk tetap mendirikan negara ideal. Merosotnya etika politik sebuah negara sering kali disebabkan merosotnya moralitas politisi. Dalam hemat penulis kondisi tersebut disebabkan terputusnya hubungan agama dan negara yang diakibatkan timbulnya paham sekularisme dari barat. Sehingga dalam konteks ini, etika politik mempunyai porsi yang cukup dalam dasar negara. Meskipun tidak berlandaskan Islam tapi Indonesia mempunyai falsafah yang memuat dasar keIslaman yang tertuang dalam pancasila. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup telah mengikat dan mendarah daging dalam bangsa ini serta mengikat dalam sebuah aturan yang diakui untuk mengatur kenegaraan, cita-cita luhur. Namun dalam prakteknya, sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam sebuah negara ideal. Untuk itu perlu adanya pemahaman dalam menyelenggarakan negara dan menjiwai sifat kenegaraan agar terwujudnya negara yang *baldatun toyyibatun warobbun ghafur* dan diridhoi oleh Allah SWT. Maka dengan demikian, penulis menyarankan sudah seharusnya etika politik Islam Indonesia: studi atas konsep dan aksi politik Mohammad Natsir sebagai tawaran dalam menyelesaikan problematika umat dan bangsa. Namun, bukan

hanya saja sekedar tawaran melainkan sebagai landasan untuk memuat nilai kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Primer

- Mohammad Natsir, 2008. *Capita Selecta, Jilid 1*. Cet. Keempat. Jakarta: Abadi.
- , 2008. *Capita Selecta, Jilid 2*. Cet. Kedua, Jakarta: Abadi.
- , 2008. *Capita Selecta, Jilid 3*. Cet. Pertama, Jakarta: Abadi.
- , 2011. *Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- , 1988. *Pak Natsir 80 Tahun: Penghargaan dan Penghormatan Generasi Muda*. Buku Kedua, Jakarta: Media Dakwah.
- , 2001. *Agama dan Negara*. Jakarta: Media Dakwah.

Buku Sekunder

- Ahmad Suhelmi, 2002. *Polemik Negara Islam: Soekarno versus M Natsir*. Jakarta: Teraju.
- Dzulfikridin, 2010. *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Endang Saifudin Anshari dan Amien Rais, 1988. *Pak Natsir 80 Tahun*. Jakarta: Media Dakwah.
- Ris'an Rusli, 2012. *Pemikiran Teologi Mohammad Natsir: Analisis Perbandingan dengan Pemikiran Teologi Islam Klasik*. Yogyakarta: Idea Prees.
- Remy Madinier, 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Mizan.
- Samsuri, 2004. *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Suyitno, 2015. *Konsep Negara menurut M. Natsir suatu tinjauan dalam pemikiran politik Islam*. Yogyakarta: Idea Press.
- Thohir Luth, 1999. *M Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Waluyo, 2009. *Dari Pemberontakan Menjadi Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Yusril Ihza Mahendra, 1999, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi dan Parta Jama'at-i-Islami*, (Jakarta: Paramadina)

Buku-Buku Pendukung Lainnya

- Abdul Aziz Thaba, 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Karim, 2007. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafi.
- Arief Furchan dan Agus Maimun, 2005. *Studi Tokoh: Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- A.W. Widjaja, 1989. *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Sejarah Lintasan Dua Dasawarsa 1945-1965*, Jakarta: Fajar Agung.
- Asmaran AS, 1994. *Pengantar Studi Akhlaq*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Qodir Jailani, 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Carlton Clymer Rodee, dkk., 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dudung Abdurrahman, 2001. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- E. Herman Khaeron, 2013. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun, Berbasis Nilai Islam*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Endang Saifuddin Anshari, 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – 1959*. Jakarta: Rajawali.
- Faisal Baasir, 2003. *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Franz Magnis Suseno, 1995. *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus Syam, 2004. *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik*. Jakarta: Dyatama Milenia.
- Ganis Harsono, 1989. *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hafied Cangara, 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Inu Kencana Syafi'i dan Azhari, 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Joeniarto, 1986. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- K. Bertens, 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2010. *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- MD. Susilawati, dkk., 2010. *Cetakan Kedua, Urgensi Pendidika Moral Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*. Yogyakarta: Surya Perkasa.

Nasiwan, 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Ombak.

Oneng Nurul Bariyah, 2007. *Materi Hadist Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Kalam Mulia.

Rahmad Jatnika, 1985. *Sistem Etika Islam: Akhlaq Mulia*. Surabaya: Pustaka Islam.

Rosihon Anwar, 2010. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.

Roso Daras, 2013. *Total Bung Karno Serpihan Sejarah yang Tercecer*. Depok: Imania.

Said Aqil Husein Munawar, dkk., 2001. *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Moyo Segoro Agung.

Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Sabar Sitanggang, dkk., (Ed), 2001. *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*. Jakarta: Bulan Bintang.

Siti Syamsiatun dan Nihayatul Wafiroh, 2013. *Philosophy, Ethics, and Local Wisdom in the Moral Contruction of the Nation*. Geneva: Globethics.net.

W. Poespoprodjo, 1999. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika.

Wahyudi Kumorotomo, 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal, Undang-Undang, dan Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990).

Runi Hariantati, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*. (Jurnal: DEMOKRASI Vol. II No. 1, 2003).

Prihatin Dwihantoro, *Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik*. (Jurnal: POLITIKA Vol. IV No. 2, Oktober 2013).

Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir tentang Hubungan Islam dan Negara*, (Jurnal: Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015).

Jurnal Transnasional, Vol 6, No 2 Februari 2015. dalam tulisan Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Mohammad Nasir tentang Hubungan Islam dan Negara*.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2013.

Tim Redaksi, *Profil 143 Pahlawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2009.

Ketetapan MPR RI Nomor: I/MPR/2003 *tentang peninjauan kembali materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002*. Sekretariat Jendral MPR RI 2014.

Undang-Undang Republik Indoonesia, Nomor 12 Tahun 2006. *Tentang Kewarganegaraan. Republik Indonesia*.

Destri Rapita, 2016. *Kebijakan Politik Soekarno Terhadap Peran Partai Politik Islam pada Masa Orde Lama*. (Tesis).

Tim Syaamil Al-Qur'an, 2010. *Terjemah Tafsir per Kata*. Bandung: Sygma

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_tokoh_Minangkabau

<https://www.islampos.com/muhammad-natsir-2-menteri-dengan-jas-bertambal-4972/>

<http://www.setneg.go.id>, dalam tulisan Yusril Ihza Mahendra, *Menyelamatkan NKRI; Berkaca pada Peran Syafoeddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir* diposting pada Jum'at 09 Februari 2007

<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/11/08/ucapan-terima-kasih-2/>

<http://Kamusbesar.com>

<http://kbbi.web.id>

http://www.kompasiana.com/amfatwa/pemikiran-m-natsir-dan-kontribusinya-dalam-pembangunan-negara-kesatuan-1_55123cc1a33311dd56ba8011.

<http://www.riauonline.co.id/nasional/read/2017/01/13/catatan-yudi-latif-ketuhanan-mohammad-natsir-3>